

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART SCHOOL*
DI KOTA MAKASSAR**

IMMAWATY HASRULLAH

Nomor Stambuk : 105610476913



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART SCHOOL*
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh
IMMAWATY HASRULLAH
NOMOR STAMBUK : 105610476913

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Program *Smart School* di Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Immawaty Hasrullah

Nomor Stambuk : 10561 0476 913

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

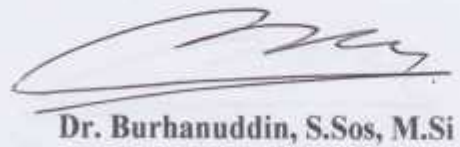
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Budi/Setiawati, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administarsi Negara



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

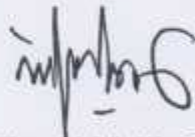
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0014/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



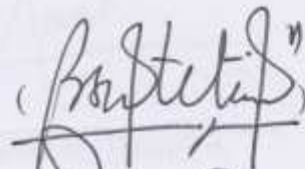
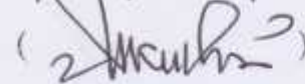
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
4. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Immawaty Hasrullah

Nomor Stambuk : 10561 0476 913

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Desember 2017

Yang menyatakan,

Immawaty Hasrullah

ABSTRAK

IMMAWATY HASRULLAH. Implementasi Program *Smart School* di Kota Makassar. (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Burhanuddin).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi program *smart school* di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada implementasi program *smart school* di Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pendekatan ini peneliti menggali informasi secara ilmiah tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Makassar. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe studi kasus. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan para responden kunci yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik dalam menggali data adalah melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari tiga indikator yang meliputi Modernisasi informasi, tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah dan wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam program *smart school* menunjukkan bahwa program ini belum terlaksana secara maksimal pada sekolah yang melaksanakan program *smart school*. Adapun faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan program ini di Kota Makassar adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi social, ekonomi dan politik dan disposisi implementor.

Kata Kunci : Implementasi, Program *Smart School*

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan magfirah_Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul : Implementasi Program *Smart School* di Kota Makassar, dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini . Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari ibu Dr. Hj.Budi Setiawati, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besrnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM , sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibunda Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos, M.Si , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
5. Seluruh Aparat kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Kota Makassar, SMAN 3 Makassar dan SMPN 6 Makassar yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan selama penulis melaksanakan penelitian.
6. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Makassar khususnya Pikom IMM Fisip Unismuh Makassar yang telah memberikan banyak pengalaman hidup yang luar biasa.

7. Sahabat-sahabatku sedari SMA : Indah Mayasari, Ria, Nisa, Dewi, Bella, Indah Cahyani, dan Indah Mardhatillah yang senantiasa memberi motivasi kepada penulis.
8. Khusus ucapan terima kasih tak terhingga kepada saudara-saudaraku tercinta : Wawan, Iqbal, Ulfa, Izza, Iwan, Ana, Endut dan Ade yang senantiasa memberikan nasehat, bimbingan, motivasi, serta pengorbanan waktu, tenaga dan materi kepada penulis dalam melakukan penelitian dan penyelesaian tugas akhir skripsi.

Teristimewah penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Amrullah, S.Pd, M.Pd dan Almarhumah Ibunda Hasmila,S.Pd yang senantiasa memerikan nasehat, bimbingan, motivasi dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tak lupa pula jasa-jasanya dalam melahirkan, membesarkan, dan membina serta mendidik penulis. Semoga jeripayah Ayahanda dan Almarhumah Ibunda tercinta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasana ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara.

Makassar, 30 Desember 2017
Penulis

Immawaty Hasrullah

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Implementasi.....	8
B. Program <i>Smart School</i>	20
C. Kerangka Pikir	26
D. Fokus Penelitian	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Objek Penelitian	38
B. Implementasi Program <i>Smart School</i> di Kota Makassar	46
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program <i>Smart School</i> di Kota Makassar.....	67
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir 27

DAFTAR TABEL

2.1 Informan Penelitian.....	32
4.1. Data Siswa SMPN 12 Makassar Tahun Jaran 2017/2018.....	42
4.2. Data Guru, Staf dan Karyawan SMPN 12 Makassar	42
4.3. Data Siswa SMPN 6 Makassar Tahun Jaran 2017/2018.....	44
4.4. Data Guru, Staf dan Karyawan SMPN 6 Makassar	45
4.5. Rekapitulasi Per Komponen Dana BOS Kota Makassar 2017	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas pendidikan di Kota Makassar merupakan pondasi utama bagi kemajuan suatu daerah, prioritas peningkatan dalam meningkatkan mutu pendidikan baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Pemerintah Kota Makassar memiliki revolusi pendidikan dengan menjalankan 18 poin program peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar yang dimana diantaranya adalah program *Smart School*. Akib (2010), alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1980), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Program *Smart School* ini bukan kali pertama dicetuskan di kota Makassar, tetapi sudah ada beberapa kota-kota besar di Indonesia yang sudah menerapkan program ini.

Program *Smart School* ini sebenarnya sudah lama diterapkan di Kota Makassar akan tetapi mengalami beberapa pergantian nama seiring dengan pergantian Kepemimpinan di Kota Makassar. Nama yang pertama kali digunakan

adalah Sekolah Unggulan yaitu sekolah bermutu yang dimana ketika siswa telah tamat di Sekolah Unggulan memiliki kemampuan intelektual, moral dan keterampilan yang dapat berguna bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu terjadi pergantian nama yaitu RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yaitu sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada.

Pengembangan SBI di Indonesia didasari oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3. Dalam ketentuan ini, pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Standar internasional yang dituntut dalam SBI adalah standar Kompetensi lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, SDM, fasilitas, manajemen pembiayaan, dan penilaian standar internasional. Dalam SBI, proses belajar mengajar disampaikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Program *smart school* ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Makassar yaitu *Smart City* yang telah menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2015 dan merupakan bagian dari inovasi pemerintah kota sebagaimana yang tertuang di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan atribut inovasi yang dijadikan ukuran pelaksanaan inovasi pemerintahan daerah, UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU No.18 tahun

2002 tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Sekolah RSBI berganti nama menjadi Sekolah Rujukan. Sekolah Rujukan ini yang akan membina sekolah di sekitarnya, bagaimana pembelajaran dan perpustakaan yang baik, menyiapkan materi pembelajaran dan mendorong terciptanya perpustakaan digital di daerah tersebut. Diharapkan dengan adanya Sekolah Rujukan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan terjadi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekolah Rujukan ini juga merupakan sarana memanfaatkan teknologi informasi, karena teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan layanan tetapi menjadikan informasi lebih akurat, cepat, variatif dan mudah diakses. Adapun syarat-syarat Sekolah Rujukan yakni sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum 2013, memiliki ruangan atau lahan yang cukup, tidak ada system pembelajaran yang *double shift* dan sumber daya manusianya memadai.

Tahun 2016 tepatnya bulan April, Pemerintah Kota Makassar melahirkan inovasi demi terwujudnya Makassar sebagai kota dunia. Dan kali ini, Pemkot Makassar hadir dengan program *Smart School* yang merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Danny Pomanto selaku Walikota Makassar, guna peningkatan mutu pendidikan serta keterwujudan Makassar *Smart City*. Program *Smart School* yaitu program peningkatan mutu pembelajaran berbasis teknologi. Adapun hal yang ingin dicapai dalam program *Smart School* ini adalah bagaimana siswa dan pengajar mendapatkan tontonan yang mengandung informasi positif dalam lingkup area sekolah. Serta dapat menjadi wadah kreativitas siswa di

bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media, yaitu TV digital berbasis sekolah. Sehingga karya yang dihasilkan siswa tersebut, dapat terwadahi oleh TV digital berbasis sekolah ini.

Sekolah yang menerapkan program *Smart School* haruslah mencapai standar-standar nasional yang sudah ditetapkan dalam 18 poin program peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar diantaranya; *Smart Library*, *Smart Class*, *Smart Education*, dan Sekolah Adiwiyata. Program *Smart School* di Kota Makassar saat ini baru diterapkan pada tiga Sekolah Menengah Pertama dan tiga Sekolah Menengah Atas. Dari enam sekolah yang menerapkan program *Smart School* ini adalah sekolah yang sebelumnya dikenal dengan predikat sebagai sekolah unggulan. Berdasarkan data yang dilansir dari media *online* RakyatSulsel.com (2015), Sekolah yang menerapkan program *Smart School* di Kota Makassar yaitu: SMPN 6 Makassar, SMPN 30 Makassar, SMPN 12 Makassar.

Kategori sekolah yang menerapkan program *Smart School* dapat ditinjau dari beberapa aspek. Secara Akademik, sekolah *Smart School* memberikan standar sampai 80 sedangkan sekolah pada umumnya memberikan standar pencapaian kepada siswanya pada setiap mata pelajaran hanya 70 hingga 75 saja. Selain itu, Sarana dan prasarana yang Luar biasa dan beda dari yang lain, tenaga Pengajar (Guru) yang berkompeten dan berprestasi hingga dari segi Spiritual diterapkan *one day one* ayat bagi seluruh elemen yang berada di sekolah tersebut

Hasil pengamatan sementara penulis tentang penerapan program *smart school* di Kota Makassar tersebut belum mampu melaksanakan secara maksimal

dikarenakan beberapa kendala salah satunya terkendala dalam hal finansial. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang diungkapkan oleh Prasajo (2012), bahwa memang masalah Finansial sangat mempengaruhi proses implementasi pendidikan, tanpa adanya finansial yang mendukung kebijakan publik tidak akan berjalan secara maksimal. Kendala utamanya adalah persoalan pembiayaan, dikarenakan tidak adanya perbedaan yang diberikan oleh pemerintah antara sekolah biasa dengan sekolah yang menerapkan Program *Smart School*. Padahal pengeluaran yang dikeluarkan sekolah *Smart School* jauh lebih besar dibandingkan dengan sekolah biasa apalagi dipersoalah kelistrikan. Karena lebih banyaknya teknologi yang digunakan sekolah *Smart School* dibandingkan sekolah biasa.

Terdapat cara yang dapat digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai menurut Akib (2010). Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, meng-kombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Adapaun standar yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah unggulan yang melaksanakan program *Smart School* ini adalah. Pertama; Modernisasi Informasi,

sekolah-sekolah tersebut harus memanfaatkan teknologi yang sudah sangat canggih pada era sekarang ini. Seperti halnya beberapa sosial media seperti *WhatsApp* dan *Line* yang bisa dimanfaatkan oleh para guru dan siswa agar lebih mudah untuk berkomunikasi. Kedua; Tontonan yang mengandung informasi positif dalam lingkup area sekolah. Para Guru harus mengantisipasi murid-muridnya menonton hal-hal yang mengarah ke negative. Oleh karena itu para guru harus menyuguhkan siswa-siswa tontonan yang bermanfaat yang dapat menunjang kualitas diri para siswa di sekolah. Ketiga; Wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media, yaitu TV digital berbasis sekolah. Setiap siswa tentunya punya potensi masing-masing, oleh karena itu lewat wadah ini para siswa mampu mengembangkan potensinya masing-masing di bidang desain, menulis, media, dan lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program *Smart School* di Kota Makassar” demi mencapai tujuan utama Pemerintah Kota Makassar yang mengusung konsep “Makassar *Smart City* dan Makassar Menuju Kota Dunia”. Hal ini tentunya menjadi semangat baru untuk dunia pendidikan Kota Makassar, terlebih program seperti ini telah dilakukan di hampir seluruh kota besar di dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program kebijakan pemerintah tentang program *Smart School* di Kota Makassar ?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program *Smart Scool* di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program *Smart Scool* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program *Smart Scool* di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai program *Smart School* di bidang pendidikan dari pemerintah Kota Makassar serta dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui implementasi program kebijakan pemerintah tentang program *Smart School* di Kota Makassar.
 - b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui masalah pendidikan di Kota Makassar khususnya mengenai program *Smart School* dan dapat menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Geroge Merriam dan Charles Merriam dalam Kamus Webster (1964) merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practicia effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Berikut ini beberapa pengertian implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli, yaitu :

- a) Aneta (2010), Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya

pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

- b) Nurhadjado (2008), dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
- c) Bardack dalam Agustin (2006), bahwa implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam katakata dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk yang memuaskan orang.
- d) Mazmanian dan Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab (2008) mengatakan bahwa, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

- e) Meter dan Horn dalam Agustino (2006), memberikan definisi Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- f) Howlet dan Ramesh dalam Arifin (1995) Implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil. Definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Pandangan beberapa ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Definisi implementasi kebijakan publik secara kompleks dijelaskan oleh Meter dan Horn dalam Agustino (2006), menurutnya Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- b) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga

diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Defenisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi

kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2. Model Implementasi

Beberapa teori dari beberapa ahli yang berpendapat mengenai model implementasi kebijakan menurut Subarsono (2008) , yaitu :

a) Model George C. Edward, dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau carapandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu,

untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure(SOP)* dan fragmentasi.

- b) Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier. Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

Karakteristik masalah (*tractability of the problems*) :

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*):

1. Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memilikidukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap program social, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.

4. Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable effecting implementation*):

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
2. Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan publik.
3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.
4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor .pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang

telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

c) Model Cheema dan Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni; kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumberdaya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

d) Model Wimer, Welmer dan Vining mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu :

1. Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
3. Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat menurut Sunggono (2009) yaitu:

a). Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b). Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c). Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d). Pembagian Potensi

Musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik menurut Anderson dalam Arifin (2014), yaitu:

- a) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah.
- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.

- d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat menurut Aminuddin Bakry (2010). Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

B. Program *Smart School*

1. Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi oleh para ahli :

- a) Sukrisno (2001) yang mengatakan bahwa program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara pelaksanaannya.

- b) Anwar Harjono (2010) yang mengatakan bahwa program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.
- c) Saifuddin Anshari (2005) yang mengatakan bahwa sebagai unsur dari suatu perencanaan, program dapat pula dikatakan sebagai gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran, yang di maksudkan untuk menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan datang.
- d) Wiryanto Dewobroto (2011) mengatakan bahwa penyusunan program kerja adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (1999) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas
- b) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin
- d) Pengukuran ongkos yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut
- e) Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
- f) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang

sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa di dalam proses pelaksanaan suatu program sekurang kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak ada menurut Syukur Abdullah (1994) antara lain sebagai berikut :

- a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b) Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
- c) Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap Menurut Suryati (2010) , yaitu :

- a) Merancang (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b) Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktu-struktur dan personalia, dana serta sumber sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian

pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan keinginan.

2. Program *Smart School*

a) Pengertian Program *Smart School*

Sekolah pintar atau *smart school* merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar-mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik Menurut Ya'acob (2005) dalam jurnal H.Azman.

Aris Muanandar (2008), pada dasarnya penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Sedangkan tujuan utama teknologi dalam pembelajaran adalah (1) untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran; dan (2) untuk meningkatkan kinerja. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas sekolah, siswa dan guru misalnya semakin lebih mudah.

b) Aplikasi *Smart School* di Indonesia

Penggunaan teknologi dalam konsep sekolah pintar dapat terlihat dari beberapa hal. Dari sisi guru, pengelolaan administrasi lebih mudah dilakukan. Misalnya, penulisan, penyusunan maupun perencanaan rencana pembelajaran

dapat dibandingkan dengan rencana pembelajaran guru-guru lain yang tergabung dalam komunitas pendidikan. Memasukan nilai siswa juga bisa dilakukan secara online dan data tiap guru dapat disimpan di server sekolah dengan menggunakan jaringan LAN. Teknologi berbasis internet juga dapat digunakan dalam membangun media komunikasi sekolah. Informasi dan sosialisasi program sekolah ke pihak orang tua dapat dilakukan lewat *website*. Begitu juga dengan agenda online siswa yang dapat diakses melalui *multi platform*.

Komunikasi antar guru dan siswa juga semakin mudah dengan adanya sosial media, seperti *Facebook*, *Line* dan *WhatsApp* yang menghubungkan guru dengan siswa tanpa mengenal waktu dan tempat. Selain itu manfaat penggunaan teknologi ini juga bertujuan untuk menghemat pemakaian kertas (*paperless*), penyampaian informasi lebih cepat dan lebih mudah didapat, ketrampilan menggunakan teknologi terasah dan kinerja sekolah dan individu lebih baik. Sekolah Bintang Mulia di kawasan Mekar Wangi, Bandung, merupakan contoh sekolah yang mengembangkan pendidikan berbasis teknologi informasi. Pihak sekolah memberikan dukungan dengan memberikan pelatihan kepada para guru dan siswa untuk dapat menggunakan tablet dalam mengerjakan administrasi dan tugas-tugas sekolah.

c) Tantangan Program *Smart School*

Generasi tua menolak dengan alasan tidak paham/sulit/tidak mau belajar, belum semua sekolah difasilitasi koneksi internet atau belum terbiasa dengan sistem *e-learning* dan *e-assessment* adalah contoh tantangan dalam membangun konsep sekolah pintar ini. Menurut Sthraubahaar (2012) berhasil tidaknya

integrasi teknologi pendidikan dalam kegiatan belajar - mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu perencanaan strategis, rasa memiliki, sumberdaya yang ada dan pengembangan profesional . Beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam menyikapi penggunaan teknologi yaitu keterbukaan terhadap teknologi, sikap guru, pengetahuan dan ketrampilan, dan waktu dan beban kerja guru. Jika salah satu faktor ini tidak mendukung atau tidak berjalan dengan baik maka berpotensi menghambat integrasi pembelajaran.

Berhasil atau tidaknya implementasi penggunaan teknologi di sekolah juga berhubungan dengan perencanaan strategis, rasa memiliki, sumberdaya yang ada dan pengembangan profesional. Kendala utama dalam aplikasi sekolah pintar di Indonesia terletak pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur internet. Istilah *Digital divide* merujuk pada satu istilah yang menggambarkan adanya kesenjangan penggunaan teknologi internet antara si kaya dan si miskin, antara kulit putih dan kaum minoritas . Istilah ini juga menciptakan jurang kelas baru yang terjadi pada masyarakat kelas bawah, yang tidak dapat menikmati akses dan layanan internet. Di seluruh dunia, *digital divide* dapat dilihat di negara berkembang. Penduduk pedesaan, kelompok minoritas dan kelompok penduduk yang memiliki pendapatan rendah adalah mereka yang paling minim mendapat *exposure* teknologi ini . Daya jangkauan telepon seluler di Indonesia mencapai 90% dari teritori Indonesia di tahun 2010 (Jakarta Globe, 6 Januari 2012). Pasar yang potensial ini bisa menjadi jembatan atau penghubung yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan digital. *Digital divide* di Indonesia dapat dilihat dari terkonsentrasinya penggunaan teknologi berbasis internet di

pulau Jawa, terutama di kota-kota besar. Daerah tertinggal atau pulau-pulau yang jauh, sayangnya belum mendapatkan akses internet.

Mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memiliki rencana yang dikenal dengan dengan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Salah satu yang menjadi prioritas adalah dengan membangun *interconnectivity* antara enam koridor ekonomi, yang salah satunya adalah investasi infrastruktur di bidang informasi dan teknologi komunikasi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian tersebut. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program *Smart School* di Kota Makassar. Terdapat tiga indikator dalam pelaksanaan Program *Smart School* di Kota Makassar yaitu :

1. Modernisasi informasi
2. Tontonan yang mengandung informasi positif dalam lingkup area sekolah
3. Wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media, yaitu TV digital berbasis sekolah.

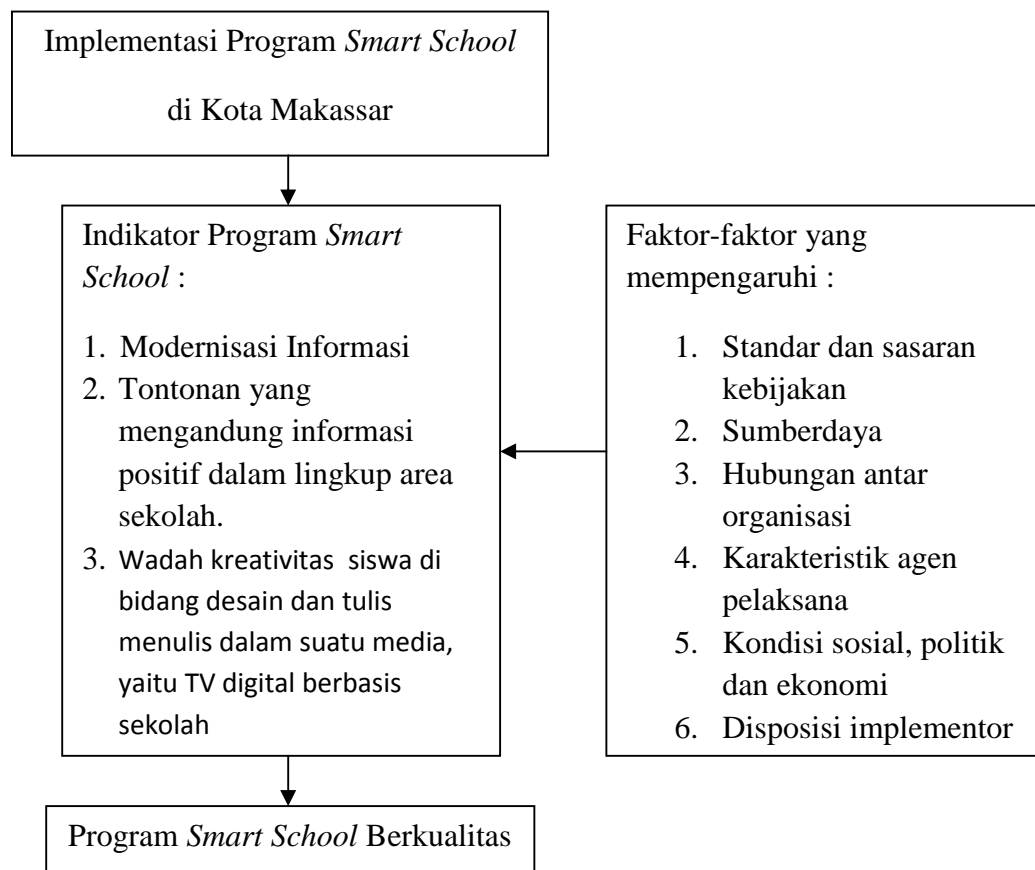
Dalam upaya menjawab permasalahan *Smart School* di Kota Makassar, maka teori Meter dan Horn yang dianggap paling mendekati permasalahan tersebut. Menurut Meter dan Horn dalam Erwan Agus (2006), terdapat enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan

2. Sumberdaya
3. Hubungan antar organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi Implementor

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini berangkat dari rumusan masalah, yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan

pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah modernisasi informasi, tontonan yang mengandung informasi positif dalam lingkup area sekolah, dan wadah kreativitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media, yaitu TV digital berbasis sekolah.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini perlu diperjelas dengan dikemukakannya deskripsi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Modernisasi Informasi :
 - a). *Student Smart Card*
 - b). *Smart Class*
 - c). Komunikasi antar guru, siswa dan orang tua siswa lebih muda.
2. Tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah
 - a). *E-Learning*
 - b). *E-Book*
3. Wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media yaitu TV digital berbasis sekolah dalam hal ini adalah pembuatan Bulletin.
4. Standar dan sasaran kebijakan
 - a). Penggunaan ICT (*information, communication, technology*)
 - b). Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris
5. Sumberdaya
 - a). Sumberdaya manusia
 - b). Sumberdaya Financial

6. Hubungan antar organisasi
 - a). Pemerintah dan sekolah yang melaksanakan program *smart school*
 - b). Antar sekolah melaksanakan program *smart school*
7. Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini adalah Struktur Birokrasi.
8. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
 - a). Kondisi ekonomi lingkungan
 - b). Sejah mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan
9. Disposisi implementor dalam hal ini adalah Respon implementor terhadap kebijakan.
10. Program *smart school* berkualitas, penggunaan teknologi dalam konsep *smart school* dapat terlihat dari beberapa hal. Dari sisi guru, pengelolaan administrasi akan lebih mudah dilakukan. Teknologi berbasis internet dapat digunakan dalam membangun media komunikasi sekolah. Begitu juga dengan agenda *online* siswa yang dapat diakses melalui multi *platform*. Inilah yang dimaksud dengan program *smart school* berkualitas demi terwujudnya mutu pendidikan di Makassar menjadi lebih baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan setelah adanya izin penelitian. Adapun lokasi penelitian di sekolah-sekolah yang melaksanakan program *Smart School*. Pilihan penelitian atas Kota Makassar dikarenakan banyaknya program-program pemerintah setempat demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Peneliti mengumpulkan data berupa cerita responden/informan. Pendekatan kualitatif di pilih peneliti karena didalam penelitian ini peneliti akan meneliti sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dapat di perhitungkan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Selain itu peneliti ingin menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis, sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan kondisi di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe studi kasus. Merupakan fenomena khusus, hadir dalam konteks terbatas. Kasus tersebut bias individu, kelompok kecil, organisasi, peristiwa khusus tertentu. Studi kasus sendiri

mempelajari suatu fenomena spesifik, dimana fenomena dan konteks saling terkait untuk memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta/aspek dari kasus tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara dan beragam sumber.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer di peroleh langsung dilapangan seperti wawancara pada para ahli dan meninjau langsung lokasi penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa pada sekolah-sekolah yang melaksanakan program *Smart School*.
2. Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari data-data histori Dinas Pendidikan Kota Makassar dan teori-teori penunjang penelitian yang diperoleh dari beberapa buku diktat.

D. Informan Penelitian

Mengingat peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan penelitian sebagai sumber data primer penelitian. Menurut Moleong dalam Devita (2007) pada penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (*Purposive Sampling*). *Purposive Sampling* yang dimaksudkan dalam peneltian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung kedalam permasalahan peneltian. Dapat dikatakan

bahwa orang tersebut adalah informan penelitian ini. Dalam hal ini, yang menjadi informan penelitian adalah :

Tabel.2.1. Informan Penelitian

Informan Penelitian	Jumlah
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Makassar	1
Kepala-kepala sekolah pada sekolah yang melaksanakan program <i>Smart School</i> (SMPN 6 Makassar dan SMPN 12 Makassar)	2
Guru-guru pada sekolah yang melaksanakan program <i>Smart School</i> (SMPN 6 Makassar dan SMPN 12 Makassar)	2
Siswa-siswa pada sekolah yang melaksanakan program <i>Smart School</i> (SMPN 6 Makassar dan SMPN 12 Makassar)	2
Total	7

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

a) Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehubungan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti akan mewawancarai informan penelitian yang telah ditentukan dengan mengunjungi langsung lokasi para informan berada dengan membawa pedoman pertanyaan yang telah disusun

agar mempermudah dalam wawancara. Wawancara ini di lakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemandapan masalah yang dijelajahi.

b) Observasi

Observasi digunakan mendapatkan gambaran konkrit mengenai implementasi pemerintah Kota Makassar pada program “*Smart School*” khususnya pada Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang di anggap berhubungan dengan objek yang diteliti , atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Peneliti akan turun ke lapangan dalam hal ini sekolah-sekolah yang melaksanakan program tersebut untuk mengamati apakah sekolah tersebut betul-betul sudah menjalankan program tersebut atau tidak. Dalam hal ini peneliti akan melihat dari beberapa sudut seperti, para siswanya, sarana dan prasarana yang ada serta teknologi yang digunakan oleh sekolah tersebut.

c) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan penulis disini adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang termasuk dengan masalah penelitian yaitu implementasi program *Smart School* di Kota Makassar. Peneliti akan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program tersebut agar keabsahan datanya lebih kuat di Dinas

Pendidikan Kota Makassar dan sekolah-sekolah yang melaksanakan program tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan sebelumnya, akan dianalisis dengan metode menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi demi menjawab fokus permasalahan yang menjadi inti dari penelitian yang dilaksanakan. Secara lebih rinci, berikut akan diuraikan bagaimana tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa penelitian kualitatif :

1. Mengorganisasikan data, dalam tahap ini, data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan berbagai teknik khususnya dari hasil wawancara mendalam yang dituliskan dan direkam oleh peneliti, kemudian dibuat transkripnya dengan mengubah data berupa rekaman menjadi data yang tertera dalam bentuk uraian tertulis. Data yang diperoleh peneliti program *Smart School* dari semua informan yang terpilih, kemudian dibaca berulang-ulang oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran hasil yang jelas.
2. Pengelompokan Data, pada tahap ini peneliti membaca kembali wawancara dan melakukan *coding*. Melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat kemudian dikelompokkan dan dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Hal ini ditempuh untuk menentukan apakah data yang telah didapatkan

bisa menjawab rumusan masalah tentang program pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar ataukah tidak.

3. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data. pada tahap ini, kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan tinjauan teori yang digunakan, sehingga dapat diuji apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang diperoleh.
4. Mencari alternatif penjelasan bagi data, dalam tahap ini, peneliti mencari alternatif penjasalam lain karena bisa saja ditemukan adanya hal baru yang berbeda dengan kesimpulan awal yang didapatkan atau menyimpang dari asumsi terkait kebijakan pemerintah pada *Smart School* yang semula dikembangkan peneliti dan tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Tahap penjelasan ini dibantu dengan berbagai referensi teoritis untuk memudahkan peneliti dalam menarik sebuah kesimpulan penelitian.
5. Menuliskan hasil penelitian, pada tahap ini peneliti mulai menuliskan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan untuk mengantarkan peneliti dalam merumuskan sebuah kesimpulan tentang bagaimana gambaran pendidikan di Kota Makassar, khususnya terkait kebijakan pemerintah dan faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan *Smart School* di Kota Makassar.

G. Pengabsahan Data

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitaitaf. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton dalam Sulistiany (1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

- a) Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
- b) Triangulasi Pengamat, adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.
- c) Triangulasi Teori, penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
- d) Triangulasi metode, Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (*Internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut.

3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

Teknik pengabsahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik Triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan dengan observasi, dokumentasi. Triangulasi sumber yang berbeda. Dengan triangulasi ini, maka dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau narasumber memberikan data yang berbeda, berarti datanya belum kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini bertujuan untuk member gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang Implementasi program *smart school* di Kota Makassar.

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar

Dinas Pendidikan Kota Makassar terletak di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar. Lokasi gedung Dinas Pendidikan Kota Makassar bertempat di kecamatan Rappocini tepatnya di Jl. Letjen Hertasning Kota Makassar. Kode Pos : 90222.

a). Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Makassar, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, serta sarana dan prasarana;

2. Penyusunan rencana dan program di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, serta sarana dan prasarana;
3. Pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, serta sarana dan prasarana;
4. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, serta sarana dan prasarana;
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pembinaan unit pelaksana teknis.

b). Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Subbagian keuangan
 - c. Subbagian perlengkapan
3. Bidang pendidikan dasar, terdiri atas :
 - a. Seksi pengembangan kurikulum pendidikan dasar
 - b. Seksi ketenagaan dan kelembagaan pendidikan dasar

- c. Seksi pembinaan kesiswaan pendidikan dasar
- 4. Bidang pendidikan menengah, terdiri atas :
 - a. Seksi pengembangan kurikulum pendidikan menengah
 - b. Seksi ketenagaan dan kelembagaan pendidikan menengah
 - c. Seksi pembinaan kesiswaan pendidikan menengah
- 5. Bidang pendidikan non formal dan inforlam, terdiri atas :
 - a. Seksi pendidikan anak usia dini
 - b. Seksi pendidikan kesetaraan
 - c. Seksi pendidikan masyarakat
- 6. Bidang sarana dan prasarana pendidikan, terdiri atas :
 - a. Seksi analisa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
 - b. Seksi pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Seksi pendayagunaan sarana dan prasarana
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

c). Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Makassar

Dinas Pendidikan menetapkan Visi tahun 2014-2019 yaitu “ Mewujudkan Pendidikan yang Berwawasan Global, Iovatif, Berkarakter dan Religius”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dinas pendidikan Kota Makassar menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyediakan deposito pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
2. Menjamin kesetaraan dan ketersediaan akses layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau.

3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis e-learning yang merujuk pada perkembangan global.
4. Meningkatkan kompetensi tenaga-tenagan pendidik untuk menjamin relevansi iuran pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Menjamin keterlaksanaan Program Pendidikan Universal dan Program Pendidikan Orang Dewasa (Melek Huruf).
6. Menjamin keterlaksanaan kurikulum yang holistic berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral dan karakter bangsa.
7. Mewujudkan kelestarian dan memperkuat kebudayaan lokal.
8. Menjamin penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel

2. SMPN 12 Makassar

SMPN 12 Makassar terletak di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar. Lokasi gedung di Perumahan Dosen Unhas Makassar tepatnya di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Kode Pos : 90245.

a). Data Siswa, Guru, Staf dan Karyawan

Data siswa di SMPN 12 Makassar berdasarkan data Admnistrasi pada tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 703 Siswa yang terbagi dalam 32 Kelas yaitu 10 Kelas di Kelas VII (Tujuh), 10 Kelas di Kelas VIII (Delapan), 10 Kelas di Kelas XI (Sembilan), dan kelas akselerasi 2 kelas. Sedangkan Data Guru, Staf dan Karyawan di SMAN 3 Makassar, Data Guru berjumlah 59 guru yang terbagi dalam beberapa mata pelajaran, Staf berjumlah 5, dan Karyawan berjumlah 11 yang terbagi menjadi Pustakwan, Laboran, Satpam dan Petugas Kebersihan.

Tabel 4.1. Data Siswa SMPN 12 Makassar Tahun Jaran 2017/2018

No	Kelas	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
1.	VII (Tujuh)	10 Kelas	240 Siswa
2.	VIII (Delapan)	10 Kelas	220 Siswa
3.	XI (Sembilan)	10 Kelas	198 Siswa
4.	Akselerasi	2 Kelas	40 Siswa

Sumber: SMPN 12 Makassar Tahun 2017

Tabel 4.2. Data Guru, Staf dan Karyawan SMPN 12 Makassar

No	Jenis Ketenagaan	PNS	Honor	Jumlah	D3/ Lebih rendah	S1	S2
1.	Guru	57	9	66	-	52	14
2.	Staf Tata Usaha	4	1	5	2	3	-
3.	Pustakawan	1	2	3	2	1	-
4.	Laboran	1	1	2	-	2	-
5.	Satpam		2	2	2	-	-
6.	Petugas Kebersihan		2	2	2	-	-

Sumber: SMPN 12 Makassar Tahun 2017

b). Visi dan Misi SMPN 3 Makassar

Visi SMP Negeri 12 Makassar adalah terwujudnya budaya baca dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan siswa. Untuk mencapai visi tersebut perlu adanya tindakan strategis. Misi SMP Negeri 12 Makassar yaitu :

1. Memberi bimbingan dan pengembangan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di sekolah.
2. Melestarikan buku pustaka sebagai hasil karya budaya.
3. Layanan informasi perpustakaan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya.
4. Mengembangkan kemampuan mencari dan mengolah serta memanfaatkan informasi.
5. Mendidik siswa agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat dan berhasil guna.
6. Meletakkan dasar-dasar kearah belajar mandiri.
7. Memupuk dan mengembangkan minat dan bakat siswa dalam segala aspek.
8. Menumbuhkan penghargaan siswa terhadap pengalaman.

c). Sarana dan Prasarana

Adapun sarana yang dimiliki oleh SMPN 12 Makassar adalah :

- 1) Sarana Ruang dan Laboratorium, terdiri dari : Ruang Perpustakaan, lab Fisika, lab kimia, lab biologi, lab bahasa, lab computer, lab IPS, Ruang kesenian, ruang media audio visual, ruang olahraga, lapangan olahraga, dan ruang serbaguna.
- 2) Sarana Penunjang Ruang dan Laboratorium, terdiri dari : Buku, Alat peraga pembelajaran, Alat praktik, media pendidikan (OHP, Audio player/radio, slide projector/LCD, computer, dan papan displa/madding)

- 3) Sarana Ruang Penunjang, terdiri dari : Ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, BK, OSIS, Komite sekolah, serba guna, UKS, Ibadah, Pos satpam, Kantin dan ruang sanggar.

Sedangkan prasarana yang dimiliki oleh SMPN 12 Makassar adalah : instalasi air, jaringan listrik, jaringan telpon, internet, akses jalan, parkir mobil/motor dan lapangan upacara.

3. SMP Negeri 6 Makassar

SMP Negeri 6 Makassar terletak di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar. Lokasi gedung di Jl. Jendral Ahmad Yani No.25 tepatnya di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Kode Pos : 90111.

a. Data Siswa, Guru, Staf dan Karyawan

Data siswa di SMPN 6 Makassar berdasarkan data Administrasi pada tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 1.337 Siswa yang terbagi dalam 36 Kelas yaitu 12 Kelas di Kelas VII (Tujuh), 12 Kelas di Kelas VIII (Delapan), dan 12 Kelas di Kelas XI (Sembilan). Sedangkan Data Guru, Staf dan Karyawan di SMAN 3 Makassar, Data Guru berjumlah 54 guru yang terbagi dalam beberapa mata pelajaran, Staf berjumlah 4, dan Karyawan berjumlah 13 yang terbagi menjadi Pustakwan, Laboran, Satpam, Kesehatan dan Petugas Kebersihan.

Tabel 4.3. Data Siswa SMPN 6 Makassar Tahun Jaran 2017/2018

No	Kelas	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
1.	VII (Tujuh)	12 Kelas	450 Siswa
2.	VIII (Delapan)	12 Kelas	430 Siswa

3.	XI (Sembilan)	12 Kelas	425 Siswa
4.	Akselerasi	2 Kelas	32 Siswa

Sumber: SMPN 6 Makassar Tahun 2017

Tabel 4.4. Data Guru, Staf dan Karyawan SMPN 6 Makassar

No	Jenis Ketenagaan	PNS	Honor	Jumlah	D3/ Lebih rendah	S1	S2
1.	Guru	48	6	54	-	42	10
2.	Staf Tata Usaha	2	2	4	2	2	-
3.	Pustakawan	2	1	3	1	2	-
4.	Laboran	1	1	2	-	2	-
5.	Kesehatan		2	2		2	
6.	Satpam		3	3	3	-	-
7.	Petugas Kebersihan		3	3	3	-	-

Sumber: SMPN 6 Makassar Tahun 2017

b. Visi dan Misi SMPN 6 Makassar

Visi SMPN 6 Makassar adalah menjadi SMP yang berkualitas berlandaskan IMTAQ, IPTEK, dan Unggul dalam olahraga serta menghasilkan tamatan yang mampu bersaing ditingkat Nasional dan Global. Sedangkan Misi SMPN 6 Makassar adalah :

- a). Meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan IMTAQ dan sifat kemandirian.
- b). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan IPTEK.

- c). Meningkatkan kualitas kompetensi guru dan pegawai dalam mewujudkan standar pelayanan minimal (SPM).
 - d). Memberdayakan lingkungan sekolah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.
- c. Sarana dan Prasarana
- a). Ruang kelas terdiri dari 36 Kelas
 - b). Ruang sarana penunjang, terdiri dari : ruang laboratorium bahasa, lab. komputer, lab IPA, ruang multimedia, perpustakaan multimedia, ruang keterampilan, ruang UKS, Kantin Kejujuran, Ruang BK/BP, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang OSIS, Musholla, *security* pos, halaman *rest room*, rumah sampah, dan bank sampah.
 - c). Prasarana yang tersedia di SMPN 6 Makassar adalah : alat olahraga, alat lab IPA (Fisika dan Biologi), alat lab.bahasa, peralatan TIK, alat peraga IPS, alat kesenian, alat peraga matematika, buku perpustakaan, alat peraga SBK, komputer PC, laptop, LCD Proyektor, TV multimedia.

B. Implementasi Program *Smart School* di Kota Makassar

Penerapan program *smart school* di Kota Makassar masih sementara dilaksanakan, dalam praktek ataupun implementasi suatu kebijakan ataupun program yang dibuat pemerintah tentunya harus dilihat dari beberapa hal untuk mengetahui apakah suatu program tersebut menjadi alat atau akses bagi sekolah-sekolah yang memang selama ini dibutuhkan, yaitu : 1. Modernisasi informasi, 2. Tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah, 3. Wadah

kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media yaitu TV digital berbasis sekolah.

1. Modernisasi Informasi

Modernisasi informasi atau yang dikenal Teknologi Informasi (TI) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi, suatu istilah yang tidak asing bagi umat manusia di dunia. Modernisasi Informasi dalam konsep *Smart School* dapat terlihat dari beberapa hal yaitu : a). *Student smart card* , b). *Smart class*, dan c). Komunikasi antar guru, siswa dan orang tua siswa lebih mudah.

a) *Student Smart Card*

Student smart card yaitu kartu yang ditujukan untuk siswa dimana terapat banyak manfaat dari kartu tersebut yang dapat membantu siswa menjalankan aktivitasnya di sekolah maupun di luar sekolah. Diantaranya adalah berfungsi sebagai kartu pelajar, tabungan, meminjam buku di perpustakaan, dan sebagai alat tukar menukar di sekolah maupun di luar sekolah. Dari hasil wawancara dengan Kepala bidang pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kota Makassar, bahwa :

“program *smart school* ini lebih mengarah ke bagaimana sekolah tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga memudahkan dalam menjalankan aktivitas dan berkomunikasi di sekolah seperti yang telah dilaksanakan oleh beberapa sekolah yaitu pengadaan *student smart card* yang fungsinya sangat banyak bagi siswa tetapi itu belum sepenuhnya teralisasi dengan baik karena ada beberapa kendala yang menghambat (Hasil wawancara dengan informan AH, 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan AH bahwa Program *smart school* tersebut dalam modernisasi informasi lebih mengarah ke pemanfaatan teknologi

yang saat ini berkembang pesat di sekolah dalam proses belajar mengajar sehingga lebih mempermudah dalam menjalankan aktivitas dan berkomunikasi di sekolah maupun di luar sekolah. Program *smart school* ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Makassar yaitu *smart city* yang dimana sekolah mengusahakan agar segala yang manual sudah ditiadakan lagi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi. Seperti pengadaan *student smart card* yang telah direalisasikan pada beberapa sekolah dan *smart class* yang sampai saat ini belum terimplementasi secara maksimal. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan Menengah dalam hal Modernisasi Informasi pada Program *Smart School* ini diperjelas oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar yang menyatakan bahwa:

“*Smart school* itu fokusnya ke *Students Smart Card* yaitu kartu pintar untuk siswa. Fungsinya ialah selain berfungsi sebagai kartu pelajar atau kartu siswa, dia mempunyai fungsi-fungsi yang lain yaitu : bisa digunakan untuk belanja, bisa juga digunakan sebagai *e-money* (dompet elektronik), meminjam buku di perpustakaan dan bisa juga digunakan di luar sekolah dan semua itu terintegrasi lewat hp orangtua. Saat ini kami telah menerapkan kepada siswa, jadi semua siswa diharapkan memiliki kartu tersebut. Melalui kartu tersebut aktivitas siswa lebih efektif dan efisien (Hasil wawancara dengan informan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M , program *smart school* ini sangat membantu pihak sekolah apatahlagi orangtua siswa agar para siswa lebih terkontrol segala aktivitasnya melalui *Students Smart Card*. Selain itu, sangat mempermudah juga bagi para siswa untuk menjalankan aktivitasnya karena lebih efektif dan efisien. *Students Smart Card* ini sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam program *smart school*, karena kartu tersebut sudah terhubung secara elektronik ketika siswa ingin menggunakannya dimanapun.

Orang tua siswa juga secara tidak langsung dapat memantau apa-apa saja yang dilakukan anaknya di sekolah karena akan mendapat notifikasi lewat hpnya.

Mengenai *Students Smart Card* ini, tentunya yang dilibatkan adalah para siswa. Karena para siswalah yang akan memanfaatkan dan menggunakan kartu tersebut. Tetapi *Students Smart Card* ini nyatanya belum tersosialisasi kepada seluruh siswa dan telah dimanfaatkan secara maksimal kepada siswa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPN 12 Makassar, bahwa:

“*Students Smart Card* itu sendiri, dalam hal sosialisai belum tersampaikan secara menyeluruh. Kami pernah melaksanakannya tapi itu terhenti karena kami terhambat di persoalan dana karena dalam membuat kartu tersebut kami harus bekerja sama dengan salah satu bank yang ada di Indonesia (Hasil wawancara dengan AS 20 Juli 2017).”

Berdasarkan wawancara dengan informan AS bahwa, *Students Smart Card* yang diperuntukkan untuk siswa belum dapat tersosialisasikan secara merata kepada seluruh siswa yang ada di sekolah. Hal tersebut diungkapkan karena masih adanya siswa yang belum memiliki dan program *Students Smart Card* sempat terhenti untuk sementara karena adanya kendala yang menghambat. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Makassar mengenai Modernisasi Informasi dalam hal ini mengenai *Students Smart Card* diperjelas oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, yaitu :

“tentang kartu tersebut saya sudah dua tahun di sekolah ini tetapi saya belum dapatkan sampai sekarang. Saya dan teman-teman pernah dijanji bahwa akan diberikan pada saat kelas 1 atau pada saat menjadi siswa baru tapi sampai sekarang belum ada. Kami akan tetap menunggu karena kartu tersebut akan bermanfaat sekali bagi kami para siswa dan orang tua kami di sekolah. Mungkin ada yang menghambat pihak sekolah sampai saat ini belum memberi kartu tersebut (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NA mengenai Modernisasi Informasi dalam hal ini *Students Smart Card*, belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada para siswa di beberapa sekolah yang menerapkan program *smart school*. Ada beberapa yang menghambat hal tersebut belum terimplementasi secara maksimal salah satunya adalah dipersoalkan pendanaan karena pihak sekolah tidak ingin membebani para siswa untuk membayar kartu tersebut. Jadi pihak sekolah mencari berbagai cara agar tersebut bisa dihindari, salah satunya yaitu bekerja sama dengan salah satu bank yang ada di Indonesia.

b) *Smart Class*

Smart class yaitu kelas yang di dalamnya sudah memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Diantaranya yaitu terdapat TV digital dan komputer yang dapat digunakan untuk belajar dan pada saat ujian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek Kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“*smart class* kami sudah menerapkan dua tahun belakangan ini tetapi belum maksimal karena masih terbatasnya sarana yaitu komputer yang ada di dalam setiap kelas sehingga ketika ujian berlangsung memakan waktu yang lama karena ujian dibagi menjadi dua gelombang dan belum semua kelas juga terdapat computer sehingga masih ada kelas yang harus ke lab computer untuk ujian. Jadi siswa mengerjakan soal ujian di computer dan nilainya akan langsung terlihat. Selain itu, absen siswa juga kami sudah tidak menggunakan yang manual tapi kami pake absen elektrik dan langsung terhubung ke orang tua. (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan M bahwa pemanfaatan teknologi dalam program *smart school* dibuktikan dengan sudah tidak diberlakukannya lagi hal-hal yang manual tetapi diganti dengan teknologi seperti pada saat ujian bahkan absen siswa yang sudah elektrik. Tetapi program *smart class* ini belum terimplementasi secara maksimal karena masih terkendala di sarana yang tersedia

yaitu Komputer. Hal tersebut yang menjadi kendala yang berefek pada pelaksanaan program *smart school* ini. Pernyataan yang disampaikan oleh Informan M mengenai inovasi Modernisasi Informasi diperjelas oleh Wakasek Humas SMPN 12 Makassar, yaitu :

“ujian menggunakan computer pada *smart class* ini belum kami realisasikan sepenuhnya jadi hanya terdapat beberapa kelas saja yang disebut sebagai kelas percontohan yang kita namakan *smart class* di dalamnya terdapat computer yang bisa digunakan oleh siswa untuk ujian atau untuk hal yang lain. Karena kami terkendala di dana sehingga belum bisa menyediakan sarana yang mendukung pada program *smart school* ini, padahal program ini sangat bermanfaat untuk siswa agar menghindari kecurangan pada saat ujian sangat bermanfaat juga bagi para guru karena guru sudah tidak perlu memeriksa hasil ujian para siswa satu per satu karena itu memerlukan waktu yang cukup lama. (Hasil wawancara dengan RL 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan RL pada indikator modernisasi informasi dalam hal ini *smart class* belum terlaksana secara maksimal karena pada program ini para siswa difasilitasi oleh pihak sekolah untuk memanfaatkan teknologi salah satunya ketika melaksanakan ujian. Persoalan dana menjadi permasalahan utama dalam hal ini, sehingga mengakibatkan sarana dan prasarana belum memadai seperti yang seharusnya terjadi. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu siswa SMPN 6 Makassar bahwa :

“kalau kami mau ujian memang sudah tidak menggunakan kertas lagi tapi menggunakan komputer, jadi nilainya bias langsung terlihat tapi kami harus ke kelas percontohan dulu kalau mau ujian atau ke lab komputer karena belum semua kelas terdapat komputer itupun kami harus bergantian atau bergelombang masuk (Hasil wawancara dengan TH 17 Juli 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TH tersebut di atas dalam Modernisasi informasi pada program *smart school* ini sangat membantu terutama dalam ini para guru selaku yang menjadi orang tua kedua siswa ketika berada di sekolah. Tetapi pada program *smart school* ini yaitu modernisasi informasi pada

penerapan *smart class* nyatanya belum terimplementasi secara maksimal karena belum semua kelas terdapat komputer yang bisa digunakan siswa untuk ujian atau hal yang lain. Hal tersebut semata-mata terkendala di persoalan dana sehingga pihak sekolah belum bisa menyediakan sarana yang mendukung pada program *smart school*. Hal tersebut diperjelas oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“*smart class* tentunya sangat menguntungkan bagi kami sebagai siswa karena pertama, kami belajar lagi hal yang baru mengenai pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dan yang kedua, kami dituntut untuk belajar lebih giat lagi karena melalui ujian menggunakan computer ini sangat meminimalisir dan menghindari kecurangan saat ujian yang ingin dilakukan oleh siswa. Tetapi disamping itu, mungkin sekolah kalau bisa menambah lagi perangkat komputernya supaya lebih maksimal saat ujian berlangsung (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan NA mengenai *smart class* yaitu pemanfaatan teknologi ketika ujian sebenarnya sangat menguntungkan bagi siswa itu sendiri, karena siswa akan mengetahui dan mempelajari hal baru lagi mengenai informasi teknologi yang sebelumnya mereka belum mengetahui sama sekali dalam program tersebut mereka dituntut untuk tahu dan mempelajarinya sehingga pengetahuan akan teknologi bagi siswa akan bertambah. Selain itu, program ini juga menuntut para siswa lebih giat lagi dalam belajar karena kemungkinan kecurangan akan sangat sulit dilakukan oleh siswa ketika ujian sedang berlangsung. Tetapi setiap kelebihan tentu ada kekurangan, seperti yang sudah dijelaskan di atas kekurangannya yaitu di sarana dan prasarana yang belum memadai dikarenakan terkendala dipersoalan finansial.

c) Komunikasi Antar Guru, Siswa dan Orangtua Siswa Lebih Mudah.

Komunikasi antar guru dan siswa juga semakin mudah dengan adanya sosial media, seperti *Facebook*, *Line* dan *WhatsApp* yang menghubungkan guru dengan siswa tanpa mengenal waktu dan tempat. Berdasarkan wawancara oleh salah satu siswa SMPN 6 Makassar :

“dengan grup itu sangat mempermudah kami sebagai siswa untuk mendapatkan Informasi dari guru, jadi kami tidak perlu lagi menelfon atau bahkan mendatangi rumahnya seperti dulu. Karena terkadang ada informasi dari sekolah yang harus segera siswa tau seperti libur atau kegiatan sekolah lainnya. Dengan grup itu juga kami merasa dekat dengan wali kelas kami, sehingga sudah tidak canggung atau kaku ketika di sekolah (Hasil wawancara dengan TH 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TH bahwa grup yang ditujukan untuk guru dan siswa atau guru dan orang tua siswa. Sangat bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Karena siswa lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi yang terbaru mengenai perkembangan di sekolah. Selain itu orang tua siswa juga diuntungkan dengan dapat memantau anaknya secara tidak langsung melalui grup tersebut. Adapun yang disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan SMPN 12 Makassar “

“ kami sangat memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial untuk komunikasi. Kalau grup sudah banyak untuk menjalin komunikasi agar efektif antar guru, siswa , bahkan orang tua siswa. Saya pikir bagus sekali. Jadi kami selaku yang bertanggung jawab atas seluruh siswa selama berada di sekolah lebih mudah untuk mengontrol kegiatan ataupun ada masalah dari siswa tersebut (Hasil wawancara RL, 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RL bahwa, pemanfaatan informasi teknologi khususnya media sosial di lingkup area sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh elemen baik itu kepala sekolah, tenaga pengajar, para

siswa bahkan orang tua siswa itu sendiri. Khususnya untuk pihak sekolah selaku yang bertanggung jawab atas seluruh siswa selama berada di lingkungan sekolah akan lebih mudah untuk mengontrol aktivitas dan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sehingga jika ada yang perlu segera ditindak lanjuti oleh pihak sekolah akan lebih cepat diatasi melalui komunikasi lewat media sosial tersebut. Hal tersebut senada yang disampaikan oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar bahwa :

“setahu saya kalau *smart school* memang bagaimana memanfaatkan teknologi. Kami sebagai siswa merasa komunikasi berjalan dengan baik dengan adanya grup-grup yang dibuat. Sangat mempermudah kami jika ada keluhan atau masalah. Apalagi pada persoalan tugas, lebih mudah komunikasi antar kami sebagai siswa dan guru. contohnya ketika ada yang tidak hadir, dia akan tetap mengetahui perkembangan di sekolah dengan cepat melalui media social yaitu grup-grup yang telah dibuat di whatsapp atau line misalnya (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NA bahwa komunikasi sangat penting bagi para siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah yaitu komunikasi dengan memanfaatkan teknologi melalui media social seperti grup *whatsapp* dan *line* yang telah dibuat oleh pihak tertentu. Karena dengan komunikasi melalui media sosial akan lebih efektif dan efisien. Sehingga persoalan dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, para siswa juga tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan sekolah atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal di atas senada yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“kalau grup yang ada di media sosial itu memang manfaatnya sangat banyak yang bisa dirasakan langsung oleh siswa, orang tua siswa dan pihak sekolah. Selama ini belum ada kendala atau ada yang memperlumahkan karena saya kira zaman sekarang ini tidak ada yang tidak punya gadget untuk menunjang aktivitasnya, begitu pun dengan siswa kami. Tapi kami

tidak pernah mewajibkan atau memaksa siswa harus punya gadget karena tidak semua siswa kondisi sosialnya sama. Kalau ada yah lebih bagus tapi kalau tidak ada yah tidak apa-apa. Kami selalu mengingatkan kepada semua siswa agar memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat untuk mereka dan orang lain (Hasil wawancara dengan informan M 17 Juli 2017)’’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, dalam pemanfaatan informasi teknologi melalui media sosial dengan dibuatnya grup antar beberapa pihak, sampai saat ini belum ada kendala dan yang mempermasalahkannya. Karena manfaatnya sangat baik dan bisa dirasakan langsung oleh pihak-pihak tersebut apalagi di zaman yang sudah modern ini, hampir semua kalangan baik yang kecil sampai yang besar telah memiliki handphone yang bisa digunakan berkomunikasi dimana saja, begitupun dengan para siswa. Tapi pihak sekolah tetap selalu memberi peringatan kepada para siswa agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dengan baik yang dapat menunjang proses belajarnya ketika di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, Modernisasi Informasi pada program *smart school* yang terdiri dari *student smart class*, *smart class*, dan komunikasi antar guru, siswa dan orang tua siswa merupakan aspek yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu program *smart school* ini. Tetapi pada kenyataannya masih belum terimplementasi secara maksimal karena adanya beberapa kendala yang menghambat sehingga pihak sekolah masih terkendala dalam hal penyediaan sarana khususnya computer dan masih kurangnya sosialisasi kepada pihak yang membutuhkan yaitu para siswa. Padahal penerapan teknologi dalam dunia pendidikan merupakan hal yang

seharusnya diprioritaskan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Anih (2016) Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat di era globalisasi saat ini tidak berpengaruh terelakkan di dunia pendidikan. Memasuki abad ke- 21 TIK kini sangat merasa perlu dan pentingnya untuk belajar peningkatan kualitas. Sistem teknologi Informasi dan komunikasi menyediakan cakupan yang luas, cepat, efektif, dan efisien untuk penyebaran informasi ke berbagai belahan dunia. Kecenderungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan terus terjadi dan berkembang dalam memasuki abad ke-21 sekarang.

2. Tontonan yang Mengandung Informasi Positif dalam lingkup Area Sekolah

Tontonan adalah salah satu sumber belajar yang menggunakan media audio visual. Dalam hal ini televisi sudah menjadi tontonan rutin buat anak-anak, tapi seiring berkembangnya zaman tayangan dunia pertelevisian lebih banyak mempertontonkan hiburan dan tayangan-tayangan yang membuat motivasi anak untuk belajar menurun. Dalam program *smart school* ini pihak sekolah akan memfasilitasi para siswa agar mendapat informasi yang positif melalui tontonan dalam lingkup area sekolah yaitu : a). *E-learning* dan b). *E-book*.

a) *E-Learning*

Para siswa disuguhkan tontonan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri yang dapat menunjang kemampuan dan kualitas diri mereka dalam belajar di sekolah. Dalam hal ini penggunaan tv di dalam kelas dapat membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Makassar, bahwa :

“Tontonan yang positif di area lingkup sekolah itu diperlukan oleh siswa, tidak hanya mereka menerima ilmu dari penyampaian guru tetapi mendapat juga ilmu dari apa yang mereka tonton. Tentunya yang mereka tonton harus bernilai positif dan bermanfaat untuk mereka. Contohnya yang mereka tonton sejarah-sejarah atau kisah para Nabi atau apapun itu yang kemungkinan besar mereka tidak akan dapatkan diluar sana mereka dapatkan di sekolah (Hasil wawancara dengan AH 10 Juli 2017) “.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan AH bahwa, tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah sangat dibutuhkan siswa untuk menghindari mereka menonton hal-hal yang tidak seharusnya mereka tonton. Para siswa melalui program tersebut disuguhkan tontonan yang dapat menunjang mereka dalam proses pemberian ilmu. Hal senada dengan Pernyataan yang disampaikan oleh Informan AH diperjelas oleh Wakasek Kesiswaan SMPN 6 Makassar, yaitu :

“Alasan sebenarnya sekolah harus memberi tontonan yang positif di area lingkup sekolah bukan lain untuk menghindari siswa agar tidak menonton hal-hal yang seharusnya mereka tidak dinonton dalam artian yang mengarah ke negatif. Karena kalau disini para siswa dipantau segala aktifitasnya secara online di media sosial oleh BK, jadi tidak ada siswa yang mengakses di internet segala hal yang negative. Kalau kedatangan para siswa akan menerima konsekwensinya (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M mengenai tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah bahwa siswa memang sangat membutuhkan sumber ilmu baru di sekolah selain dari guru atau buku pelajaran yaitu melalui media elektronik. Karena tidak semua siswa daya tangkapnya sama, ada yang paham ketika diterangkan langsung oleh guru, ketika membaca dan ketika menonton. Jadi untuk mengimbangi itu semua sekolah juga seharusnya dapat memfasilitasi para siswa agar mendapatkan tontonan yang

mengandung informasi positif. Berdasarkan wawancara salah satu murid SMPN 6 Makassar, bahwa:

“dengan adanya tv di dalam kelas yang sangat membantu dalam proses belajar, apalagi pada saat guru absen mengajar. Di semester lalu ada salah satu guru kita yang sedang ada kegiatan di luar negeri jadi beliau tidak bisa masuk dulu untuk beberapa minggu. Jadi dimanfaatkanlah tv yang ada di kelas. Kami masih tetap belajar tanpa guru tersebut tetapi melalui *video call* dengan beliau. Meskipun agak sulit Karena jaringannya kurang bagus tetapi kami tetap mendapatkan ilmu dari beliau meskipun sedikit daripada tidak belajar sama sekali. Yah begitulah kecanggihan teknologi saat ini (Hasil wawancara dengan TH 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan TH mengenai tontonan yang mengandung informasi positif di lingkup area sekolah sangat banyak manfaatnya bagi siswa. Proses belajar mengajar akan tetap berlangsung meskipun guru tidak berada di tempat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Seperti itulah yang dinamakan *Smart School* semuanya serba pintar dalam artian dapat memanfaatkan teknologi.

Dalam penerapan program *smart school* ini pada tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah tentu tidak mudah. Karena dalam menerapkan sebuah program tidak akan berjalan mulus, banyak kemudian kendala-kendala yang ditemukan. Termasuk dalam menerapkan program *smart school*, ini Menurut wawancara dengan Wakasek Humas SMPN 12 Makassar, bahwa :

“Kalau di sekolah ini penerapan *E-Learning* kami baru menerapkan di beberapa saja yaitu ada yang namanya kelas percontohan. Nah di kelas percontohan tersebutlah semuanya serba ada, mulai dari tv, jaringan wifi dan lain-lain yang dapat menunjang siswa dalam proses pembelajaran. Kalau di kelas lain belum ada karena untuk menempatkan tv di semua kelas itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. (Hasil wawancara dengan RL 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan RL bahwa, program *smart school* pada tontonan yang mengandung informasi positif di lingkup area sekolah dalam penerapan *E-Learning* belum terlaksana secara maksimal karena belum semua kelas di sekolah tersebut dapat menerapkannya akibat terkendala dipersoalan pendanaan. Hal tersebut berefek pada implementasi program *smart school* sehingga tidak maksimal.

b) *E-Book*

Buku elektronik atau *e-book* dimana saat ini siswa tidak perlu lagi membeli buku yang sudah dicetak tetapi sudah tersedia di internet buku yang mereka akan pelajari. Sehingga bisa langsung di *download* tanpa perlu mencetaknya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 12 Makassar, bahwa :

“buku elektronik ini atau *E-Book* sudah ada dari dulu cuma karena keterbatasan teknologi jadi dulu belum bisa dimanfaatkan. Tetapi sekarang teknologi semakin canggih dan bisa diakses pada semua kalangan jadi *E-book* ini baru bisa dimanfaatkan beberapa waktu belakangan ini. Tentunya sangat membantu jadi siswa tidak perlu membeli lagi secara manual yang pastinya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tetapi bisa langsung mengaksesnya melalui internet (Hasil wawancara dengan informan AS, 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan AS bahwa, dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini penggunaan *E-Book* baru bisa dimanfaatkan sekarang ini padahal sudah ada sejak dulu. Hal tersebut sangat membantu siswa sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli buku pada umumnya sehingga dapat membantu para orang tua siswa khususnya di persoalan finansial. Para siswa tinggal mengakses di internet buku yang mereka butuhkan. Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“saat ini memang kami sudah mengurangi pembelian buku secara manual seperti yang kemarin-kemarin meskipun tetap masih ada buku yang harus dibeli siswa itupun karena tidak ada di internet. Jadi siswa bisa langsung mendownload di Hp atau laptopnya sehingga bisa dipelajari kapanpun. Meskipun memang masih sulit untuk menerapkannya karena masih ada siswa yang belum paham mengenai teknologi tersebut. Jadi lebih bermanfaat dan lebih irit tentunya untuk orang tua siswa (Hasil wawancara dengan informan M, 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan M bahwa, penggunaan *E-Book* saat ini masih proses penerapan karena memang baru diterapkan, karena masih ada buku yang tetap harus dibeli oleh siswa karena buku tersebut belum bisa diakses di internet. Selain itu masih ada siswa yang masih sulit mengaksesnya karena belum terbiasa memahami teknologi, hal tersebut menjadi tugas bagi pihak sekolah untuk bagaimana memahamkan siswa yang belum terlalu mahir menggunakan teknologi misalnya dengan mengadakan pelatihan atau semacamnya. Hal tersebut dipertegas oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“sebagai siswa dengan *E-Book* ini kami sudah tidak perlu lagi membeli buku yang telah dicetak di toko buku atau di sekolah kami tinggal mendownloadnya di laptop atau di Hp sehingga bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut juga dapat membantu kami sebagai anak-anak yang sudah memegang Hp untuk tidak mengakses di internet hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan orang tua kami juga sudah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli buku (Hasil wawancara dengan informan NA 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan NA bahwa implementasi program *smart school* dalam tontonan yang mengandung informasi positif di lingkup area sekolah pada *e-book* ini sudah terlaksana secara baik. Karena lebih efektif dan efisien khususnya bagi siswa dan orang tua siswa juga tidak perlu mengeluarkan

biaya untuk membeli buku seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, para siswa juga lagi-lagi mendapat pengetahuan baru tentang teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian, bahwa tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah yang terdiri dari *E-Learning* dan *E-Book* dalam implementasi program *smart school* sangat dibutuhkan oleh siswa dan guru. Dengan memanfaatkan teknologi yang canggih yaitu TV dan Internet proses belajar mengajar akan lebih maksimal. Tetapi yang terjadi saat ini masih kurang maksimalnya penerapan tersebut pada *E-Learning* karena kurangnya sarana yang tersedia yaitu Tv, dikarenakan ada beberapa sekolah yang terhambat di persoalan dana. Padahal penggunaan teknologi khususnya Tv jika ditempatkan pada posisinya akan memberi manfaat yang banyak apalagi di lingkungan pendidikan seperti sekolah.

Hal tersebut sejalan dengan Nurjannah (2016), Televisi sebagai salah satu faktor lingkungan sangat berperan dalam pembentukan keperibadian anak. Proses terbentuknya suatu keperibadian bisa dilihat dari proses pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Apabila dalam siaran televisi ditayangkan berita kekerasan secara berulang-ulang, tingkah laku tersebut pelan dan pasti bisa menjadi bagian dari perilaku anak. Anak sebagai individu yang rentan terhadap dampak negatif televisi seharusnya mendapat perhatian ketika menonton televisi. Orang tua memiliki peran penting dalam memediasi antara anak dan televisi, karena mediasi orang tua merupakan tindakan nyata dalam membatasi efek media massa khususnya televisi.

3. Wadah Kreatifitas Siswa di Bidang Desain dan Tulis Menulis dalam Suatu Media, Yaitu TV Digital Berbasis Sekolah.

Implementasi program *smart school* dalam wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media, yaitu TV digital berbasis sekolah. Dalam hal ini mengembangkan bakat para siswa di bidang desain dan tulis menulis, para siswa dapat menuangkan bakatnya tersebut melalui TV digital berbasis sekolah agar dapat bermanfaat dan dinikmati semua orang. Dalam hal ini, para siswa dituntut agar mampu membuat bulletin, lalu disebar ke seluruh media sosial yang ada.

Dalam program *smart school* ini melalui wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis siswa dituntut lagi agar memanfaatkan teknologi yang ada. Bulletin yang ditulis oleh siswa akan disebar melalui media sosial bahkan media cetak *online* jadi cukup diketik untuk kemudian di *share* ke sosial media dan tidak lagi diterbitkan secara manual seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang ada di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Makassar, bahwa :

“Pembuatan bulletin sebagai wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis telah diterapkan oleh seluruh sekolah yang melaksanakan program *smart school*. tetapi bulletinnya bukan yang manual lagi tetapi sudah dapat diakses di internet dan sosial media (Hasil wawancara dengan AH 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan AH bahwa implementasi program *smart school* pada wadah kreativitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam hal ini pembuatan bulletin sudah diimplementasikan oleh seluruh sekolah yang melaksanakan program *smart school* ini. Hal tersebut karena bukan hanya

mudah untuk diimplementasikan karena tidak membutuhkan dana yang besar tetapi juga sangat bermanfaat bagi siswa untuk melatih kemampuannya dan menjadi wadah dalam bidang jurnalistik. Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“ kalau di sekolah ini kamiwajibkan setiap murid membuat bulletin, bahkan sebelum kami mengikuti program *smart school* ini kami telah menerapkannya itulah satu faktor kenapa kami diikutkan dalam program ini. Karena setiap siswa pasti punya bakat menulis tetapi hanya beberapa siswa saja yang mengembangkannya padahal semuanya bisa, itu karena mereka tidak memiliki wadah oleh karena itu kamiwajibkan semuanya mampu membuat bulletin hanya saja penerbitannya setiap kelas jadi akan disaring mana yang terbaik setiap kelas dan akan terpilih satu bulletin yang akan diterbitkan di media (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan M, para siswa diberi wadah untuk mengembangkan kreativitasnya khususnya di bidang desain dan tulis menulis. Karena setiap siswa memiliki kemampuan untuk menulis untuk mengasah bakat jurnalistik dan kreativitasnya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab sekolah untuk memfasilitasi persoalan tersebut. Senada dengan pernyataan di atas di sampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Makassar, bahwa :

“untuk bulletin sekolah memang sudah ada dari dulu cuman masih manual, nah semenjak kami mengikuti program *smart school* kami dituntut untuk menghilangkan segala yang manual dan diganti dengan memanfaatkan teknologi termasuk dalam pembuatan bulletin ini. Karena saya pikir ini lebih efektif dan efisien. Efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi dananya. Dan para siswa sangat antusias apalagi ketika tulisannya dimuat di media sekolah yaitu *website* atau *facebook* sekolah karena ada kepuasan tersendiri bagi siswa itu sehingga yang lain juga ikut termotivasi bahkan pernah ada yang dimuat di media cetak *online* (Hasil wawancara dengan MM 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MM mengenai implementasi program *smart school* pada wadah kreatifitas siswa di bidang desain

dan tulis menulis bahwa program *smart school* ini memang fokusnya memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang karena lebih efektif dan efisien apalagi yang bersangkutan sosial media. Karena tidak bisa dimunafikkan anak-anak atau remaja saat ini sangat tertarik dengan sosial media oleh karena itu pemerintah dalam hal ini melalui program *smart school* mengambil sisi positifnya dengan memanfaatkan itu melalui pembuatan bulletin sekolah yang kemudian akan disebar ke media sosial.

Selain itu respon para siswa juga sejauh ini cukup antusias dan menjadi ajang persaingan secara sehat tentunya antara para siswa karena tidak semua bulletin para siswa bisa diterbitkan hanya yang terbaiklah yang akan diterbitkan di sosial media. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi para siswa untuk mengembangkan bakatnya di bidang desain dan tulis-menulis. Seperti yang diutarakan oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“semenjak ada program ini saya cukup antusias dibanding sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu agak rumit dan membutuhkan waktu dan dana yang cukup banyak. Tetapi kalau saat ini sudah bagus menurut saya. Karena memang kami diwajibkan untuk menerbitkan bulletin satu bulletin per kelas meskipun kami tidak masuk dalam ekstrakurikuler jurnalistik. Apalagi ketika bulletin kita yang terpilih dan disebar di social media sekolah dan dibaca oleh semua siswa bahkan guru, itu menjadi semangat tersendiri bagi kita. Apalagi sampai bisa lolos ke Fajar atau Tribun Timur (Hasil wawancara dengan NA 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan NA mengenai implementasi program *smart school* pada wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis mendapat apresiasi yang baik dari siswa. Karena mereka beranggapan bahwa program ini sangat bermanfaat sekali untuk diri mereka pribadi untuk mengasah kemampuannya dalam bidang desain dan tulis menulis.

Selain itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi siswa ketika tulisannya yang terpilih untuk diterbitkan. Hal tersebut dipertegas oleh salah satu siswa SMPN 6 makassar, bahwa ;

“saya sebagai siswa cukup merasakan manfaat dari pembuatan bulletin ini, karena dari yang dulunya saya tidak senang menulis,sekarang jadi senang. Dari yang dulunya tidak tahu tentang jurnalistik sekarang jadi tahu. Itu semua karena kami sudah diberi pelatihan seputar jurnalistik sebelumnya jadi kami semakin semangat dalam mengembangkan *skill* kami di bidang desain dan tulis menulis (Hasil wawancara dengan TH 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan TH bahwa, implementasi program *smart school* pada wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam hal ini pembuatan bulletin dapat menambah pengetahuan siswa dalam hal jurnalistik sehingga dalam mengembangkan kemampuannya sudah tidak sulit lagi karena di tempa dengan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Dibalik itu semua, dalam mengimplementasikan suatu program terdapat kendala atau kerumitan yang dihadapi apalagi ini menyangkut teknologi. Berdasarkan wawancara dengan wakasek kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“kalau kerumitan tentunya ada, tetapi tidak serumit dengan yang dulu pada saat kita masih memakai system manual. Kalau dilihat dari teknologi sebenarnya tidak ada karena seperti sekolah-sekolah lain itu setiap sekolah sudah terakses jaringan wifi itu mempermudah tim ekskul jurnalistik untuk menerbitkan bulletin di sosial media. Kesulitannya sebenarnya terdapat di siswanya, masih ada beberapa siswa yang masih ogah-ogahan untuk menulis (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan M bahwa kendala-kendala pasti ditemukan dalam pengimplementasian suatu program dalam hal ini kendalanya terdapat di siswa. Masih ada kemudian beberapa siswa yang masih enggan untuk menulis. Oleh karena itu untuk mengatasi itu pihak sekolah seharusnya mampu memberi semacam pelatihan jurnalistik kepada para siswa

karena tidak menutupkemungkinan, siswa tersebut enggan menulis karena belum paham seputar dunia jurnalistik. Berdasarkan wawancara dengan Wakasek Kesiswaan SMPN 12 Makassar, bahwa :

“kalau pelatihan jurnalistik itu sudah dilaksanakan oleh pihak OSIS bahkan sebelum program ini belum berjalan. Bahkan sudah ada jadwal tetapnya. Kalau saya tidak salah 1 kali per 2 minggu. Karena kalau dilaksanakan hanya 1 kali saja itu tidak cukup butuh waktu yang lama untuk memahamknkan karena dunia jurnalistik itu luas. Cuma sekarang yang saya lihat pelatihannya terhenti, karena pengurusnya sibuk menyambut siswa baru (Hasil wawancara dengan RL 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan RL, bahwa pelatihan untuk menunjang kratifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dibutuhkan oleh siswa. Karena masih banyak siswa yang masih buta akan hal itu sehingga mereka enggan untuk menyalukrkan bakatnya di bidang desain dan tulis menulis. Hal ini menjadi tugas pihak sekolah yang bekerja sama dengan pengurus OSIS sekolah tersebut untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, Implementasi program *smart school* dalam hal ini Wadah Kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis sangat dibutuhkan oleh siswa untuk menyalurkan bakatnya di bidang desain dan tulis menulis tentunya dengan dukungan yang penuh dari pihak sekolah dalam hal ini memberi pelatihan-pelatihan seputar jurnalistik untuk menunjang mereka dalam membuat bulletin untuk kemudian diterbitkan. Hal diatas sesuai dengan Saputra (2015), Pada generasi *e-learning*, kesadaran masyarakat akan proses belajar mengajar dengan menggunakan media *Information & Comunicatio Technology* (ICT) semakin besar. Fakta tersebut merupakan stimulus bagi masyarakat agar mulai menggunakan teknologi untuk

mengembangkan sumber daya manusia. Masyarakat perlu disadarkan agar penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT memperoleh perhatian yang lebih. *E-learning* dinilai mampu menjadi solusi bagi pembina kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik untuk menyajikan materi jurnalistik melalui internet.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program *Smart School* di Kota Makassar

Smart school merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi yang digunakan dalam proses belajar-mengajar di kelas. Penggunaan teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Program *smart school* ini juga tentunya dalam pengimplementasiannya tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses berlangsung, yaitu : 1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumberdaya, 3. Hubungan antar organisasi, 4. Karakteristik agen pelaksana, 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi., dan 6. Disposisi implementor.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Program Walikota Kota Makassar ini yaitu Program *smart school* tentunya ada Standard dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya karena seperti yang diketahui belum semua sekolah yang ada di Kota Makassar yaitu SMP/Sederajat yang menerapkan program *Smart School* ini karena memang ada kemudian standar yang harus dipenuhi oleh sekolah tersebut agar dapat melaksanakan program ini. Adapun standar dan sasaran pada program *smart school* ini adalah :

a). Penggunaan ICT (*Information, communication technology*) dan b). Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.

a). Penggunaan ICT (*information, communication, technology*)

Teknologi komputer dapat berfungsi sebagai teknologi informasi maupun sebagai teknologi komunikasi. ICT (*information, communication, technology*) meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan computer untuk mengelolah informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran serta sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. Sekolah-sekolah yang menerapkan program *smart school* dituntut untuk mampu menerapkan ICT di sekolah tersebut sebagai standar yang harus dipenuhi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang pendidikan menengah Kota Makassar, bahwa :

“jadi sekolah-sekolah yang melaksanakan program *smart school* ini sebelumnya harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan karena sekolah tersebut tidak akan bisa mengikuti program ini kalau standar tersebut belum dipenuhi. Salah satunya adalah ICT atau yang lebih dikenal dengan TIK. Hal tersebut sesuai dengan nama programnya yang memang menuntut memanfaatkan teknologi saat ini. Jadi, sekolah tersebut sudah menerapkan ICT ini tetapi mungkin belum maksimal (Hasil wawancara dengan AH 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan AH, bahwa sekolah-sekolah yang mengikuti program *smart school* ini harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan dari pemerintah agar dapat mengikuti program *smart school*. Salah satu standarnya adalah penerapan ICT (*information, communication, technology*) di sekolah. Hal tersebut, sejalan dengan nama programnya yaitu *smart school* yaitu bagaimana sekolah mampu memanfaatkan teknologi pada proses belajar mengajar . Jadi sekolah-sekolah yang sementara ini menerapkan program tersebut sudah menerapkan ICT ini di sekolah tersebut tetapi

mungkin belum maksimal. Hal tersebut sejalan dengan Kepala Sekolah SMPN 12

Makassar, bahwa :

“standar-standar itu sekolah ini sudah memenuhi jauh sebelum program ini ada karena rata-rata yang mengikuti program *smart school* ini sekolah yang pernah menjadi sekolah RSBI otomatis standar-standar tersebut sudah dipenuhi sebagian. Tinggal dikembangkan lagi khususnya dalam Penggunaan ICT (*information, communication, technology*) untuk mencapai tujuan dari program ini karena sampai sekarang belum ada pemanfaatan secara maksimal pada penggunaan ICT tersebut (Hasil wawancara dengan AS 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AS mengenai penerapan ICT (*information, communication, technology*) pada standar dan sasaran kebijakan bahwa, sebelum sekolah-sekolah yang melaksanakan program *smart school* ini mengikuti program tersebut, mereka sudah menjadi sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang dimana standar dan sasarannya tidak jauh beda dari program ini. Jadi, pada dasarnya sekolah tersebut sudah menerapkan ICT (*information, communication, technology*) tinggal perlu dikembangkan dan dimaksimalkan sesuai kebutuhan. Karena pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“mengenai ICT kami sudah menerapkan jauh sebelum mengikuti program *smart school* ini. Saya kira hampir semua sekolah sudah menerapkan hal itu. Cuma lagi-lagi kurang maksimalisasinya, dikarenakan beberapa kendala yang muncul seperti infrastruktur yaitu komputer yang belum memadai, penggunaan internet yang mahal dan jaringan yang terkadang kurang baik. Hal itu yang menjadi alasan mengapa belum maksimal sampai saat ini karena tentunya penggunaan ICT memang butuh infrastruktur dan dana yang tidak sedikit (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan M, bahwa terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan penerapan ICT selama ini belum maksimal dan belum dimanfaatkan secara baik yaitu infrastruktur dalam hal ini komputer

belum memadai, penggunaan internet yang mahal dan komunikasi internet yang terkadang lambat. Hal itulah yang menjadi permasalahan sampai saat ini, tentunya ketiga kendala itu berhubungan dengan financial. Karena untuk menerapkan ICT ini butuh dana yang tidak sedikit. Pihak sekolah tentunya punya dana tetapi lagi-lagi masih ada keperluan yang harus dipenuhi dan diseimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan wakasek kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan langsung baik dari siswa maupun guru dalam penggunaan ICT ini, seperti interaksi guru dan siswa melalui internet, mengembangkan kompetensi guru dan siswa di bidang ICT dan lain-lain. Manfaat tersebut telah dirasakan langsung bagi kami, namun masih ada yang perlu dibenahi agar lebih bermanfaat lagi seperti penambahan infrastruktur dan anggaran (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, disamping belum maksimalnya penerapan ICT ini terdapat manfaat-manfaat yang telah dirasakan langsung baik dari siswa maupun guru di sekolah tersebut. Seperti, interaksi siswa dan guru melalui media sosial, siswa mendapat sumber belajar alternatif yang tersedia secara luas, mengembangkan kompetensi guru dan siswa di bidang ICT dan siswa memperoleh materi ajar secara cepat dan murah berbasis ICT. Tinggal kemudian kendala-kendala yang dihadapi lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah agar dicarikan solusinya karena penerapan ICT ini sangat banyak manfaatnya dalam proses belajar mengajar.

b). Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris

Program *smart school* tidak hanya bagaimana sekolah tersebut memanfaatkan teknologi tetapi harus ditempa dengan kemampuan berbahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Hal tersebut semata-mata untuk

meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional dan inilah yang menjadi standar dan sasaran dalam program *smart school* ini. Berdasarkan wawancara dengan Wakasek Humas SMPN 12 Makassar, bahwa :

“kalau kemampuan berbahasa Inggris pada sumberdaya manusia kami sudah memenuhi, karena kembali lagi sebelum mengikuti program ini, sekolah ini adalah sekolah RSBI atau sekolah bilingual yang pastinya bahasa Inggris sudah diterapkan juga di sekolah ini meskipun belum semua SDM yang bisa berbahasa tersebut tapi kami selalu tempa dengan berbagai cara, seperti pengadaan buku bilingual dan proses belajar mengajar juga yang disampaikan oleh tenaga pengajar juga secara bilingual (Hasil wawancara dengan RL 120 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan M bahwa, setiap sekolah yang melaksanakan program *smart school* sudah memenuhi standar ini yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Karena kembali lagi ke sejarahnya kalau sebelumnya sekolah tersebut sudah menjadi sekolah RSBI atau sekolah bilingual yang tentunya sudah tidak dipertanyakan lagi persoalan kemampuan berbahasa Inggris pada sumberdaya manusianya. Meskipun saat ini belum semua siswa atau guru yang berkompeten dalam hal ini, hanya beberapa kelas saja yang disebut dengan kelas bilingual. Tetapi pihak sekolah selalu mengusahakan melalui berbagai cara agar seluruh elemen mampu berbahasa Inggris Seperti proses belajar mengajar dari guru oleh siswa secara bilingual. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu siswa SMPN 6 Makassar, bahwa :

“kalau menurut saya sesuai dengan namanya program *smart school* jadi bukan hanya sarana dan prasarannya saja yang debut dengan *smart school* tetapi sumberdaya manusianya juga melalui kemampuan berbahasa Inggris. Kalau kami sebagai siswa memang dituntut untung mampu menguasai Bahasa Inggris karena itu adalah Bahasa Internasional. Saya kira ini sangat bermanfaat bagi masa depan kami kelak karena tentu akan dibutuhkan *skill* berbahasa Inggris kelak. Meskipun kami belum terlalu fasih tapi pihak

sekolah menempa kami dengan berbagai cara, seperti pengadaan buku bilingual (Hasil wawancara dengan TH 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan TH bahwa, kemampuan berbahasa Inggris sangat dibutuhkan oleh siswa karena akan sangat bermanfaat bagi diri mereka kelak. Selain itu, para siswa juga mampu mengembangkan potensinya tersebut di tingkat nasional maupun internasional sehingga mampu mengharumkan nama sekolah bahkan Kota Makassar. Meskipun belum semua siswa fasih berbahasa Inggris namun pihak sekolah selalu menempa dengan berbagai cara seperti pengadaan buku dua bahasa secara manual maupun *e-book*. Hal yang senada juga diungkapkan oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“pada awalnya di sekolah ini ada yang namanya kelas bilingual yaitu kelas dua bahasa yang di dalamnya hanya murid-murid yang mampu berbahasa Inggris saja yang bisa masuk ke kelas tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu seluruh siswa dituntut untuk mampu fasih dalam berbahasa Inggris. Saya kira sangat baik bagi kami sebagai siswa karena dengan kemampuan berbahasa Inggris kami mampu mengembangkan potensi kami sampai ke kancan internasional. Selain itu setahu saya bukan Cuma murid saja tetapi guru yang mengajar juga. Karena hanya guru-guru yang berkualitas akan menghasilkan murid yang berkualitas juga (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan NA bahwa pada awalnya kemampuan berbahasa Inggris ini hanya dimiliki oleh siswa-siswa tertentu saja, tetapi seiring berjalannya waktu semua siswa dituntut untuk fasih dalam berbahasa Inggris. Hal tersebut semata-mata demi kebaikan siswa dimasa yang akan datang karena sudah nyata dan pasti kemampuan berbahasa Inggris akan dibutuhkan kelak. Selain siswa guru pun juga dituntut untuk fasih dalam berbahasa Inggris agar ilmu yang akan ditransfer kepada siswa akan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Karena kualitas siswa ditentukan oleh kualitas guru.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian, bahwa implementasi program *smart school* pada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu standar dan sasaran kebijakan dalam hal ini penerapan ICT (*information, communication, technology*) sudah terlaksana jauh sebelum sekolah tersebut mengikuti program *smart school* . Namun belum maksimal karena kendala yang masih menghambat seperti pengadaan infrastruktur yang belum memadai. Selanjutnya adalah kemampuan Berbahasa Inggris pada semua sumberdaya manusia di sekolah tersebut tinggal sekolah bagaimana caranya menempa SDM tersebut agar lebih fasih berbahasa Inggris. Melalui standar dan sasaran kebijakan pada program *smart school* ini implementor dapat mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan itu tercapai. Meter dan Horn dalam Sulaeman (1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implelementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Program *Smart School* ini tidak akan terlaksana jika seluruh elemen baik dari pemerintah, kepala sekolah, guru, staf dan siswa tidak bekerja sama untuk melaksanakan program ini. Semua unsur harus turut andil dan saling memberi dukungan agar program ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut juga harus berjalan beriringan dengan materi yang ada, karena program ini sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang beda dari

sekolah-sekolah pada umumnya. Sumberdaya dalam Implementasi program *Smart School* terdiri dari dua yaitu : a). Sumberdaya manusia (SDM) dan b). Sumberdaya finansial.

a) Sumberdaya Manusia (SDM)

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia. Sasaran, tujuan dari isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Makassar, bahwa :

“Sumber daya manusia sejauh ini semuanya turut ikut andil dalam pengimplementasian program *smart school* ini mulai dari kepala sekolah sampai orang tua siswa. Semuanya cukup antusias demi mewujudkan sekolah *smart school*. tapi yang paling berperan disini adalah siswa. Karena merekalah sebagai istilahnya peserta dalam program *smart school* ini. Kesemua SDM tersebut mampu bertanggung jawab dan bersifat professional terhadap tugas dan amanah yang telah diberikan (Hasil wawancara dengan AH 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan AH bahwa, sumberdaya manusia dalam penerapan program *smart school* cukup profesional dalam menempatkan diri di posisinya masing-masing. Mereka mampu bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan masing-masing. Selain itu sikap antusias yang dimiliki oleh SDM tersebut sangat berpengaruh baik dalam penerapan program *smart scool* ini. Senada dengan pernyataan di atas yang di sampaikan oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program *smart school* tiada lain adalah kami sebagai siswa dan pihak sekolah. Karena ini bagian dari program pemerintah agar sekolah lebih baik kami sebagai siswa wajib untuk

melaksanakannya begitupun juga dengan pihak sekolah mulai dari guru sampai kepala sekolah cukup antusias dalam menjalankan program ini apalagi kami sebagai siswa (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017)".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan NA , bahwa seluruh sumber daya manusia dalam pelaksanaan program *smart school* memiliki antusias yang cukup baik. Semuanya mampu bekerja kolektif kolegial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di samping itu seluruh SDM tersebut dalam menjalankan program *smart school* baru mengenal program tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan untuk memahami *Standart Operasional Prosedur (SOP)* pada program *Smart School*. Berdasarkan wawancara Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“untuk menempa SDM dalam melaksanakan program *smart school* pemerintah memberi pelatihan tetapi yang mengikuti pelatihannya itu hanya pengawas, kepala sekolah/madrasah dan TIM *Smart school* setiap satuan pendidikan, nah nanti kepala sekolahnya yang memahami kembali kepada SDM yang lain (Guru, siswa, dll) mengenai program *Smart School*. Tetapi sebenarnya kami punya harapan sebaiknya guru juga diikutkan dalam pelatihan tersebut meskipun hanya 1 atau dua orang (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan M, bahwa Pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan suatu program itu dibutuhkan agar dalam menjalankan program tersebut tidak melenceng dari Standar Operasional Prosedur sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai, dalam hal ini pemerintah sudah melaksanakan pelatihan tersebut untuk membekali para implementor dalam menjalankan program tersebut.

b) Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial yang berasal dari Pemerintah Kota Makassar , sekolah yang melaksanakan program *smart school* dan organisasi formal maupun

informal yang berasal dari luar sekolah. Berdasarkan wawancara Wakasek Humas SMPN 12 Makassar, bahwa :

”itulah yang menjadi uneg-uneg kami dalam menjalankan program *smart school* ini, karena Dana yang dikeluarkan untuk sekolah ini tidak ada yang dikhususkan untuk program ini, walaupun kami mau mengandalkan Dana BOS itu sulit karena masih ada keperluan-keperluan yang jauh lebih membutuhkan. Faktor inilah yang paling menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini (Hasil wawancara dengan RL 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan RL bahwa, dalam mengimplementasikan program *smart school* ini kendala utamanya adalah diperoslan finansial karena tidak ada dana yang dikhususkan dari pemerintah ataupun pihak sekolah itu sendiri untuk program tersebut. Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Makassar mengenai Sumber daya financial pada implementasi program *smart school*, bahwa :

”kami sangat terkendala dalam persoalan itu, akibatnya masih ada indikator yang belum terlaksana secara maksimal seperti pembuatan *student smart card*.sebenarnya kami punya harapan besar ke pemerintah tetapi kalau mau menunggu dari pemerintah itu lama, makanya kami dalam hal sangat mandiri kami akan bekerja sama dengan Bank dalam pembuatan *smart card student* sehingga kita sama-sama untung begitu istilahnya (Hasil wawancara dengan AS 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AS bahwa, akibat persoalan anggaran yang belum rata disalurkan oleh pemerintah masih ada kemudian indikator dari program *smart school* ini yang belum berjalan secara maksimal. Mengatasi hal tersebut, pihak sekolah kemudia bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini Bank untuk memaksimalkan program *smart school* ini. Hal di atas dipertegas oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar yang menyatakan bahwa :

”Sebagai siswa yang turut ikut andil dalam pelaksanaan program *smart school* ini kami tidak pernah dipunguti biaya sedikit pun dari pihak sekolah

semuanya gratis apalagi pada pembuatan *student smart class* kami tidak membayar. Hal inilah yang menjadi hambatan kenapa pembuatan *student smart class* saat ini terhenti karena sekolah terhambat di pendanaan (Hasil wawancara dengan informan NA 20 Juli 2017)".

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan NA bahwa, sumber daya finansial menjadi faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan program *smart school*. Karena untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang program ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dukungan dari pemerintah dalam hal finansial juga masih belum ada sehingga pihak sekolah dituntut untuk mandiri dalam mengatasi persoalan ini dan pihak sekolah juga tidak ingin memberatkan siswa dengan melakukan pemungutan biaya. Berdasarkan hal diatas berikut Rekapitulasi per komponen Dana BOS Kota Makassar 2017

Tabel.4.5. Rekapitulasi Per Komponen Dana BOS Kota Makassar 2017

No	Komponen	Triwulan			
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	Pengembangan Perpustakaan	Rp.172,375,000	Rp. 44,110,000	0	0
2	Penerimaan Peserta Didik Baru	Rp.86,892,800	Rp.2,500,000	0	0
3	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Rp.876,988,445	Rp. 7,000,000	0	0
4	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	Rp.515,700,075	Rp.3,040,000	0	0
5	Pengelolaan Sekolah	Rp. 477,964,045	Rp.12,990,000	0	0
6	Pengembangan Potensi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	Rp.135,245,750	Rp.750,000	0	0
7	Langganan Daya dan Jasa	Rp.198,733,630	Rp.5,000,000	0	0
8	Pemeliharaan dan	Rp.309,100,025	Rp. 5,000,000	0	

	Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah				
9	Pembayaran Honor	Rp. 91,992,980	Rp.4,070,000	0	0
10	Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran	Rp. 124,205,000	Rp. 6,000,000	0	0
	Total Penggunaan	Rp. 2,989,197,750	Rp. 89.040,000		

Sumber : Kemdikbud Kota Makassar 2017

Berdasarkan table di atas bahwa, dana untuk implementasi program *Smart School* di Kota Makassar tidak disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi tersedia dana untuk memfasilitasi semua yang dibutuhkan dalam program tersebut yaitu pada pembelian alat multi media pembelajaran. Tinggal bagaimana sekolah tersebut mengelola dana sebaik mungkin agar semua kebutuhan sekolah dapat tersedia dan program *smart school* dapat juga berjalan secara maksimal. Berdasarkan wawancara dengan Wakasek Kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“Mengenai sumber daya financial itu memang masih terkendala. Sebenarnya setiap sekolah sudah diberi oleh pemerintah Dana BOS setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan bisa saja kita gunakan sebagian dana dari Dana BOS untuk menunjang program *smart school* ini tetapi itu sulit karena masih ada yang perlu diprioritaskan. Harapan kami ada dana tersendiri dari pemerintah untuk program ini meskipun tidak banyak tetapi bisa membantu sedikit (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan M bahwa, bisa saja sekolah menggunakan Dana BOS untuk melengkapi keperluan dalam program *smart school* tetapi pihak sekolah sulit untuk menjalankannya karena masih ada keperluan-keperluan sekolah yang harus diprioritaskan. Harapan dari pihak sekolah sendiri mengharapkan dari pemerintah untuk menyediakan dana khusus untuk program *smart school* ini agar seluruh keperluan sekolah dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan implementasi program *smart school* pada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sumberdaya yaitu pada sumber daya manusia sudah tidak diragukan lagi apalagi telah ditempa dengan pelatihan. Tetapi yang menjadi masalah ada sumber daya finansialnya karena belum ada dana yang dikhususkan untuk program *smart school* ini dari pemerintah. Padahal salah satu penunjang yang paling penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan adalah tersedianya dana yang memadai. Hal itu dijelaskan oleh Winarno (2014), yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Hubungan Antar Organisasi

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggungjawab mereka. Pada Implementasi *Smart School* ini, hubungan organisasi yang dimaksud adalah : a). Pemerintah dengan Sekolah-Sekolah yang mengikuti program *smart school* dan b). antar sekolah yang melaksanakan program *smart school*.

a) Hubungan Pemerintah dan Sekolah yang Melaksanakan Program *Smart School*

Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus menjalin hubungan yang intens dengan sekolah yang melaksanakan program *smart school* ini. Agar mampu

mengetahui sejauh mana program ini telah dijalankan oleh pihak sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Makassar, bahwa :

“komunikasi antara pemerintah dengan pihak sekolah itu tidak pernah putus. Apatahlagi pada setiap pekan diadakan rapat dengan sekolah-sekolah, pada saat itulah kami menanyakan seputar perkembangan dari program *smart school* di sekolah tersebut. Dan pada saat pembuatan SOP kami melibatkan seluruh sekolah yang mengikuti program ini agar kita bisa menyatukan standar dan tujuan bersama sesuai dengan yang diinginkan (Hasil wawancara dengan AH 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AH bahwa, hubungan pemerintah dengan pihak yang melaksanakan program *smart school* intens dilaksanakan. Karena ada pertemuan khusus antar pemerintah dengan pihak sekolah untuk mengetahui sejauh mana program *smart school* ini berjalan. Selain itu dalam penentuan kebijakan yang menyangkut program *smart school* ini pemerintah melibatkan pihak sekolah. Adapun menurut Kepala Sekolah SMPN 12 Makassar yang menyatakan, bahwa :

“Hubungan kami pihak sekolah dengan pemerintah sampai saat ini berjalan dengan baik. Kami sering memberi masukan satu sama lain. Kami menyampaikan keluhan kami kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Dan pemerintah mampu memberi solusi yang terbaik. Hanya saja belum adanya aplikasi dari solusi tersebut. Tapi bagi kami itu sudah lebih dari cukup. Solusinya akan kami pecahkan secara kolektif kolegial (Hasil wawancara dengan AS 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan AS bahwa komunikasi dalam menjalankan sebuah program itu penting untuk mengetahui sejauh mana program telah berjalan. Kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik maka program yang dijalankan tidak akan berjalan secara maksimal. Sehingga komunikasi harus terus berjalan antara pembuat kebijakan dan implementor. Komunikasi juga mampu membuat hubungan emosional antar kedua pihak dalam

hal ini pemerintah dan pihak sekolah berjalan dengan baik. Dalam hal penentuan kebijakan harus dilibatkan kedua belah pihak agar lebih memaksimalkan program yang akan berjalan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu siswa SMPN 6 Makassar, bahwa :

“sebenarnya saya sebagai siswa kurang tahu hubungan yang terjalin antar sekolah dan pemerintah tetapi yang saya perhatikan sejauh ini kemungkinan berjalan dengan baik. Karena beberapa kali datang orang dari dinas pendidikan untuk memantau perkembangan program *smart school* di sekolah ini berjalan sampai dimana (Hasil wawancara dengan TH 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TH bahwa, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar menjalin hubungan yang baik dengan pihak sekolah. Karena pihak pemerintah sekali dalam sebulan datang ke sekolah-sekolah yang melaksanakan program *smart school* untuk memantau sejauh mana program ini berjalan. Pihak pemerintah kemudian mampu melihat dan meninjau langsung program *smart school* yang dilaksanakan pada sekolah tersebut. Sehingga pemerintah dapat melihat langsung hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini.

b) Hubungan Antar Sekolah yang Melaksanakan Program *Smart School*

Hubungan antar organisasi dalam hal ini hubungan antar sekolah yang melaksanakan program *smart school* harus bersinergi satu sama lain. Dengan adanya hubungan yang terjalin antar sekolah, akan muncul inovasi-inovasi baru mengenai program *smart school* ini. Selain itu, antar sekolah ini akan saling memberi dukungan dan masukan satu sama lain. Berdasarkan wawancara dengan Wakasek Kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“kalau komunikasi antara sekolah ini dengan sekolah lain yang mengikuti program *smart school* itu lancar. Kami sering menanyakan sudah sejauh mana tujuan yang ingin dicapai. Selain itu kami juga biasa menanyakan inovasi-inovasi yang mungkin akan dilahirkan sekolah tersebut pada program *smart school*, siapa tahu kami juga bisa menerapkan. Dan tak kalah penting kami juga biasa menanyakan kendala-kendala yang dihadapi, siapa tahu kami bisa saling membantu (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, komunikasi antar sekolah yang melaksanakan program *smart school* berjalan dengan baik dan intens. Hal tersebut semata-mata untuk melahirkan lagi inovasi baru atau gebrakan baru mengenai program ini. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh masing-masing sekolah bisa diatasi secara bersama-sama dengan saling memberi masukan. Senada dengan penjelasan di atas dijelaskan oleh Wakasek Humas SMPN 12 Makassar yang menyatakan bahwa :

“Hubungan antar organisasi dalam hal ini sekolah-sekolah yang melaksanakan program *smart school* berjalan dengan lancar. Kami sering *mensupport* satu sama lain. Saling member masukan dan solusi, saling berbagi inovasi-inovasi terbaru mengenai program *smart school* (Hasil wawancara dengan RL 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan M dan RL bahwa hubungan antar organisasi pada program *smart school* ini yang melibatkan pemerintah dan sekolah-sekolah yang melaksanakan program ini baik dan lancar. Karena kalau komunikasi terputus tujuan yang ingin dicapai bisa saja tidak tercapai. Selain itu ada banyak manfaat jika komunikasi berjalan dengan baik salah satunya untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama implementor. Selain itu dengan adanya komunikasi akan tercipta inovasi-inovasi baru yang akan mendukung pelaksanaan program *smart school* agar lebih maksimal. Di samping itu siswa juga selaku salah satu implementor yang berperan penting dalam

pelaksanaan program *smart school* ini harus mengetahui sejauh mana hubungan antar pembuat kebijakan implementor. Berdasarkan wawancara salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“kalau hubungannya sejauh mana saya sebagai siswa tidak banyak tahu karena itu urusan pihak sekolah dan pemerintah. Dan yang mengetahui lebih banyak mungkin guru saja. Kita sebagai siswa hanya datang ke sekolah untuk belajar dan melakukan kegiatan yang lainnya. Tetapi harapan saya hubungan antar pihak sekolah dan pemerintah berjalan baik agar program *smart school* ini berjalan dengan maksimal (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan NA bahwa, sebagai seorang siswa mereka tidak begitu banyak mengetahui hubungan yang terjalin antar pihak sekolah dan pemerintah Kota Makassar selaku pembuat kebijakan. Tetapi mereka berharap hubungan antar keduanya seharusnya dapat berjalan dengan baik agar program *smart school* kedepan dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan implementasi program *smart school* pada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sumberdaya yaitu pada hubungan antar organisasi dalam hal ini pemerintah dan pihak sekolah sudah berjalan dengan baik. Mereka bersama-sama merumuskan standar dan tujuan yang ingin dicapai serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kedepan bisa berjalan beriringan dalam pelaksanaan program *smart school*. Hal tersebut senada dengan pendapat Septiana (2014), agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Horn dan Meter dalam Widodo (1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (Implementor). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik dari badan pelaksana dilihat dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Pada program *Smart School* agen pelaksana yang dimaksud adalah para implementor dalam hal ini pemerintah dan pihak sekolah yang melaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang pendidikan Kota Makassar, bahwa :

“Karakteristik pelaksana itu berbeda-beda karena dari sekian banyak unsur yang terlibat tentunya tidak mungkin satu pemikiran. Tetapi sejauh ini yang saya pantau khususnya di dinas pendidikan selaku penanggung jawab semuanya berusaha dan berfikir agar program *smart school* ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan karena kami merasa ini amanah dan harus dipertanggungjawabkan (Hasil wawancara dengan AH 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AH bahwa, dalam penerapan program *smart school* salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah karakteristik pelaksananya. Ketika pelaksananya itu paham mengenai program *smart school* dan memahami posisinya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut, maka program *smart school* akan berjalan dengan maksimal. Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh pelaksananya. Senada dengan pernyataan di atas disampaikan oleh Wakasek Humas SMPN 12 Makassar, bahwa :

“Kalau di sekolah ini, karena pemimpinannya tegas dan disiplin dalam artian kepala sekolahnya jadi apapun kebijakan yang dibuat harus dijalankan secara bersama-sama. Kalau dari kami guru dan staf itu mau tidak mau kami harus menjalankan kebijakan karena itu sudah menjadi tanggung jawab

kami. Tapi kalau dari siswa itu bermacam-macam ada antusias dan ada yang ogah-ogahan (Hasil wawancara dengan RL 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan RL, bahwa karakter seorang implementor dalam menerapkan sebuah program harus disiplin dan tegas agar program *smart school* dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Kalau implementor tersebut bersikap acuh maka program akan sulit untuk dijalankan. Karena keberhasilan suatu program dilihat dari bagaimana implementornya menanggapi kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“karakteristiknya dalam pelaksanaan program ini itu kalau dari guru dan staf masih ada yang kebingungan karena mereka masih kurang memahami mengenai program ini sehingga masih ada beberapa diantara mereka yang masih gagal paham tentang program ini. Hal tersebut terjadi karena belum adanya pelatihan untuk mereka mengenai program *smart school* ini (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan infroman M bahwa, para pelaksana dalam hal ini tenaga pengajar masih ada yang belum memahami sepenuhnya mengenai program *smart school* ini, sehingga berdampak pada pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan belum dilaksanakannya pelatihan atau sosialisasi tentang program *smart school*. Selanjutnya hal yang serupa di sampaikan oleh Kepala sekolah SMPN 12 Makassar, bahwa :

“Sejauh ini karakteristik dari pelaksana khususnya di sekolah ini sendiri bermacam-macam, kalau yang paham pasti akan menjalankannya dengan professional. Tapi kalau yang tidak justru sebaliknya. Tetapi rencananya kami akan memberi semacam pelatihan untuk memahamkan pada mereka yang belum paham (Hasil wawancara dengan AS 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan AS, bahwa sebagian karakteristik agen pelaksana dalam program *smart school* ini masih bersifat

menganggap program *smart school* ini sebagai formalitas bukan sebagai kebutuhan. Hal inilah yang perlu diperbaiki dengan cara memberi pelatihan kepada agen pelaksana tersebut. Selain itu hal tersebut harus mendapat perhatian khusus dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Kota Makassar agar segera memfasilitasi pelaksana untuk diberi pemahaman mengenai program *smart school*.

Disamping itu semua, karakteristik agen pelaksana juga sangat berkompeten, artinya mereka khususnya para guru dan siswa punya prestasi masing-masing baik di dalam negeri dan luar negeri untuk menunjang dan berpengaruh pada program *smart school* ini. Hal tersebut dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program *smart school*. Berdasarkan wawancara dengan Wakasek Kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“*Alhamdulillah*, guru dan siswa disini cukup berprestasi di bidangnya masing. Baru-baru ada 2 orang guru disini yang diundang ke beberapa Negara untuk mengikuti pelatihan begitupun juga dengan siswa, lewat ekskul-ekskul mereka mencetak berbagai macam prestasi bahkan sampai ke luar negeri. karena sekolah-sekolah yang mengikuti program *smart school* ini yaitu sekolah-sekolah yang mencetak banyak prestasi (Hasil wawancara dengan M 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, kualitas pelaksana juga sangat menentukan keberhasilan suatu program. Dalam hal ini kualitas-kualitas guru dan siswa pada sekolah yang melakanakan program *smart school* harus berkualitas dan mampu berkompeten. Sekolah-sekolah yang mengikuti program *smart shool* adalah sekolah-seklah yang mencetak banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa ataupun gurunya baik tingkat nasional maupun

internasional. Senada dengan pernyataan di atas di sampaikan oleh salah satu siswa SMPN 6 Makassar, bahwa :

“setahu saya program *smart school* ini juga didukung lewat prestasi-prestasi dari SDMnya. Kalau dari siswa sendiri ada beberapa teman-teman yang berprestasi baik di tingkat kota maupun nasional. Hal tersebut menjadi *point plus* dalam implementasi program *smart school* ini dan sangat berpengaruh dalam penerapannya (Hasil wawancara dengan TH 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan TH bahwa, sekolah-sekolah yang melaksanakan program *smart school* adalah sekolah yang sudah mencetak banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa dan gurunya. Dengan demikian hal tersebut dapat menunjang dalam pelaksanaan program *smart school* karena guru dan siswanya berkualitas dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian dipertegas oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar yang menyatakan bahwa :

“saya kira prestasi-prestasi yang telah dibuat oleh SDM dalam program *smart school* ini berpengaruh kepada karakteristik implementor dalam pelaksanaan program ini. Jadi berefek pada saat implementasinya. Semakin berkompeten SDMnya semakin mudah untuk menjalankan program ini (Hasil wawancara dengan informan NA 18 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan di atas , bahwa karakteristik agen pelaksana juga dilihat dari prestasi para implementor tersebut. Karena lewat prestasi itulah yang bisa menunjang program *smart school* agar bisa tercapai secara maksimal. Seperti yang diketahui sekolah-sekolah yang mengikuti program *smart school* adalah sekolah-sekolah yang mencetak banyak prestasi. Karena tidak dipungkiri prestasi-prestasi yang telah dibuat oleh para implementor berefek pada pelaksanaan program *smart school*. semakin berkompeten SDMnya semakin mudah untuk melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian implementasi program *smart school* pada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu karakteristik agen pelaksana bahwa karakteristik agen pelaksana sangat mempengaruhi implementasi program *smart school*. karena terkadang karena karakteristiknya itulah yang membuat program bisa berjalan secara maksimal atau bahkan sebaliknya. Hal tersebut sejalan yang disampaikan oleh Wayan (2015) Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. Agustino (2008) menjelaskan bahwa pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Oleh sebab itu, hal tersebut sangatlah penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Sehubungan dengan penelitian ini, maka sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana dari program ini serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan program *smart school* di Kota Makassar.

5.Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi eksternal yang kondusif. Dalam hal ini, yang menjadi indikator pada kondisi social, politik dan ekonomi pada program *smart*

school ini yaitu :a). Kondisi ekonomi lingkungan, dan b). Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

a) Kondisi Ekonomi lingkungan

Kondisi ekonomi lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan dalam hal ini Implementasi Program *Smart School*. Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 12 Makassar, bahwa :

“Sumber daya ekonomi kan berkaitan dengan financial, seperti yang saya katakan tadi untuk mencapai tujuan program ini secara maksimal masih sulit karena kita masih terkendala disitu. Apalagi semenjak melaksanakan program ini pengeluaran lebih besar apalagi untuk pemanfaatan teknologi. Sedangkan Dana yang dikeluarkan sekolah *smart school* dengan sekolah lain itu masih sama. Jadi kami berharap ada dana khusus dari pemerintah untuk program ini (Hasil wawancara dengan AS 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AS bahwa, yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program *smart school* ini adalah di persoalan anggaran atau finansial. Karena untuk mewujudkan sekolah yang berbasis ICT dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Belum adanya perbedaan dalam hal pembagian anggaran pada sekolah yg tidak melaksanakan dengan sekolah yang melaksanakan program *smart school* ini. Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Makassar, bahwa :

“sumber daya ekonomi dalam melaksanakan program ini menjadi salah satu yang terpenting. Kami dari pemerintah Kota Makassar sampai saat ini masih mengusahakan agar kendala yang menjadi utama yaitu finansial dapat diatasi. Kami sampai saat ini tidak tinggal diam dan masih mencari solusinya. Sebenarnya sudah ada solusinya Cuma belum semua sekolah dapat melaksanakannya (Hasil wawancara dengan AH 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan AH bahwa, kondisi ekonomi yang berkaitan langsung dengan finansial dalam mengimplementasikan

program *smart school* demi terwujudkan tujuan yang maksimal itu belum memadai. Hal tersebut tentu yang menjadi penghambat dalam melaksanakan program *Smart School*. Hal senada disampaikan oleh kepala sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“kalau bisa dari pemerintah ada dana khusus untuk pelaksanaan program atau inovasi yang dapat menunjang kualitas seluruh elemen yang ada di sekolah seperti program *smart school* ini. Kalau dana sebenarnya ada tetapi ada kemudian hal-hal yang lebih penting yang harus didahulukan dari program ini. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan keinginan Walikota Kota Makassar yaitu Makassar dua kali tambah baik dalam bidang pendidikan (Hasil wawancara dengan informan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, pihak sekolah berharap kepada pemerintah agar diberi dana khusus untuk program-program dari pemerintah. Karena kalau dana dari sekolah yang ingin digunakan itu sulit, masih ada kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting dan mendesak yang harus didahulukan dari program *smart school* ini. Hal ini semata-mata untuk menunjang kualitas pada pelaksanaan program tersebut.

b) Sejauh Mana Kelompok-kelompok Kepentingan Memberikan Dukungan Bagi Implementasi Kebijakan

Selain kondisi sosial-ekonomi dari masyarakat yang akan dipengaruhi kebijakan dalam program *Smart School* ini adalah kelompok-kelompok kepentingan yang dukungannya berpengaruh pada pelaksanaan program *smart school* ini dalam hal ini yaitu orang tua siswa dan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara dengan Wakasek Humas SMPN 12 Makassar, bahwa :

“orang tua siswa sampai saat ini tidak pernah ada yang komplain. Justru mereka sangat mendukung program *smart school* ini karena mereka dapat langsung merasakan manfaatnya yaitu dapat memantau keadaan anaknya di sekolah melalui *handphone*. Apalagi kami tidak membebankan biaya

sedikitpun kepada orang tua siswa tentang pelaksanaan program ini (Hasil wawancara dengan RL 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan RL bahwa, orang tua siswa selama ini sangat mendukung pelaksanaan program *smart school* ini Karena mereka dapat merasakan langsung manfaatnya. Apalagi tidak ada beban tersendiri dalam hal anggaran yang dibebankan oleh orang tua siswa. Senada dengan penjelasan di atas disampaikan oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“karena kami sebagai siswa tidak pernah dipunguti biaya selama program *smart school* ini berlangsung jadi dukungan dari orangtua cukup antusias. Orangtua sangat mengapresiasi kebijakan ini. Selain itu orangtua siswa juga merasakan langsung dampak positif dari pelaksanaan program *smart school* ini (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan NA di atas, bahwa kondisi sosial ekonomi dari orangtua siswa dalam mengimplementasikan program *smart school* ini tidak bermasalah sama sekali karena tidak ada pungutuan dari siswa maupun orangtuanya dalam melaksanakan program ini justru mereka mendukung sepenuhnya. Orang tua siswa sangat mengapresiasi program dari Walikota Kota Makassar ini karena mereka merasakan dampak positifnya secara langsung melalui program ini. Selain itu kondisi kelompok kepentingan dan swasta ada yang mendukung ataupun menentang Program *Smart School* ini. Berdasarkan wawancara Wakasek kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“kalau yang menentang sejauh ini tidak ada. Karena program *smart school* ini dilihat dari sisi manapun itu membawa manfaat. Justru kami banyak mendapat dukungan dan bantuan salah satunya itu dari pihak Bank menawarkan untuk berkerja sama dalam pembantuan *student smart card* jadi kedua bela pihak sama-sama mendapatkan keuntungan itulah salah satu bentuk dukungannya (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, bukan hanya dari pihak orang tua saja yang mendukung tetapi lembaga kemasyarakatan turut ikut

andil dalam penerapan program ini yaitu pihak Bank. Karena untuk mengatasi persoalan anggaran, pihak sekolah berkerja sama dengan bank tertentu dalam hal pengadaan *student smart card* sehingga kendala anggaran dapan diminimalisir.

Hal senada di sampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“kalau yang kontra dengan program ini sampai saat ini tidak ada. Karena memang tidak ada hal yang dirugikan dalam program *smart school* ini. Justru banyak unsur yang justru diuntungkan melalui program ini. Semua elemen yang ada di sekolah dan lembaga kemsyarakatan di luar juga merasakan dampaknya (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan M bahwa, kondisi kelompok kepentingan dan swasta juga berpengaruh dalam mengimplementasikan program *smart school* karena ada dukungan dalam bentuk materi dan materi yang diterima dari pelaksana yang dapat meningkatkan efektifitas program *Smart School* tersebut. Selain itu sejauh ini dalam pelaksanaan program *smart school* ini tidak ada kelompok yang dirugikan justru banyak yang diuntungkan melalui program ini khususnya orang tua siswa yang merasakan dampak positif dalam program *smart school* ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi peneltian implementasi program *smart school* pada kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program *smart school*. Menurut Maris (2013), Lingkungan sosial turut mempengaruhi suatu kebijakan implementatif atau tidak. Daya dukung masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau program ditunjukkan oleh sikap responsif terhadap berbagai kebijakan yang ada. Faktor ekonomi juga turut menentukan berjalan optimal atau tidak sebuah implementasi kebijakan

publik. Kondisi ekonomi di suatu wilayah yang menjadi tempat dilaksanakan kebijakan bisa mendukung ataupun menghambat implementasi kebijakan publik.

6. Disposisi Implementor

Respon implementor terhadap kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Pada program *smart school*, para implementor dalam hal ini pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa menjadi penentu seberapa berhasil program *smart school* ini dilaksanakan. Kesemua implementor tersebut harus memberi respon yang baik dan loyal dalam melaksanakan program *smart school* ini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Makassar, bahwa :

“Disposisi implementor yang menjadi penentu program *smart school* ini maksimal atau tidak. Dan sejauh ini semua unsur menerima dengan cukup antusias dan siap berkomitmen untuk menjalankan program Walikota Kota Makassar ini (Hasil wawancara dengan informan AH 10 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AH bahwa, respon implementor terhadap kebijakan dalam hal ini program *smart school* sangat mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Sesuai yang terjadi di lapangan bahwa para implementor cukup merespon dengan baik terkait program ini. Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 12 Makassar, bahwa :

“respon dari implementor di sekolah ini sangat merespon dengan baik hal tersebut karena masing-masing sadar akan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan demi kepentingan bersama dan kebaikan untuk sekolah ini (Hasil wawancara dengan AS 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MM bahwa, disposisi implementor dalam hal ini respon implementor terhadap program *smart school* ini berpengaruh pada saat program dijalankan. Kalau implementor kurang merespon atau menerima program ini maka akan sulit untuk menjalankannya. Sejauh ini

implementor cukup menerima dan loyal terhadap amanah yang diberikan sehingga berdampak pada saat implementasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 6 Makassar, bahwa :

“di sekolah ini apapun kebijakan yang dikeluarkan atau program yang dilaksanakan mau tidak mau, suka atau tidak suka harus mampu memaksimalkan semaksimal mungkin. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Toh kalau ini membawa dampak yang positif bagi sekolah dan murid kenapa tidak kita loyal. Sejauh ini semuanya mendukung dan cukup antusias apalagi para siswa (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, program *smart school* ini merupakan program bersama yang harus dilaksanakan oleh seluruh unsure yang ada di sekolah. Karena hal ini demi kepentingan dan kebaikan bersama, sejauh ini para tidak ada yang tidak mendukung program *smart school* ini. Semunya antusias dalam menerapkannya. Hal senada di sampaikan oleh Wakasek Humas SMPN 12 Makassar, bahwa :

“karena program ini ada program yang harus dipertanggungjawabkan bersama-sama dan demi kepentingan bersama agar sekolah menjadi lebih baik melalui program *smart school* ini maka semua implementor harus menerima kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan. dan harus loyal dan professional terhadap program ini (Hasil wawancara dengan RL 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara dengan informan RL bahwa, dalam implementasi program *smart school* di sekolah-sekolah yang melaksanakan semua implementor wajib untuk menjalankannya karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh unsur birokrasi di sekolah tersebut apalagi itu sudah menjadi tanggung jawab bersama. selain itu sejauh ini para implementor cukup bersifat loyal dan profesional terhadap program *smart school* ini. Berdasarkan wawancara oleh Wakasek Kesiswaan SMPN 6 Makassar, bahwa :

“sampai saat ini tidak ada yang tidak mendukung program ini. program *smart school* ini tidak mungkin bisa dijalankan sampai saat ini jika semua unsur yang terlibat tidak memaksimalkan kinerjanya yaitu memberi dukungan dan bekerja secara loyalitas untuk mencapai tujuan tersebut. Kita semua disini berusaha semaksimal mungkin dan saling memberi solusi jika ada kendala. Ibarat sebuah TIM kita harus bekerja secara kolektif kolegial (Hasil wawancara dengan M 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M bahwa, kolektif kolegial yang menjadi pegangan dari pihak sekolah dalam menerapkan program ini. Semuanya harus bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Semua pihak harus bersikap loyal dan professional terhadap tanggung jawab yang dibebankan oleh masing-masing pihak. Hal yang senada disampaikan oleh salah satu siswa SMPN 12 Makassar, bahwa :

“saya sebagai siswa pertama kali mendengar program ini langsung antusias dan menerima dengan senang. Sehingga kami sebagai implementor dapat bersikap loyal dan professional dan dapat membantu pihak sekolah agar tujuan yang ingin dicapai dalam program ini dapat tercapai (Hasil wawancara dengan NA 20 Juli 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan NA bahwa, sebagai seroang siswa kami juga harus punya kesadaran untuk membantu pihak sekolah dalam menerapkan program ini. Karena yang menjadi implementor utama adalah para siswa. Jadi para siswalah yang punya peran penting dalam pelaksanaan program *smart school* ini. Kalau siswa bersikap acuh maka program ini tidak berjalan sampai hari ini. Hal di atas diperjelas oleh salah satu siswa SMPN 6 Makassar, bahwa :

“respon dari kami para siswa sangat merespon dengan baik apalagi manfaat yang kami terima dari program ini cukup banyak sehingga kami dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam membantu pihak sekolah dalam pelaksanaan program *smart school* ini (Hasil wawancara dengan informan TH 17 Juli 2017)”.

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan TH, bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam program *smart school* ini mampu bertanggung jawab dan bekerja secara loyalitas dan tidak ada yang menentang karena pogram ini cukup banyak membawa dampak positif khususnya untuk sekolah dan para siswa. Semuanya mampu bekerja sama secara kolektif kolegial demi mencapai tujuan yang diinginkan dalam program *smart school*.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi peneltian implementasi program *smart school* pada disposisi implementor. Ke semua implentor menjadi faktor penentu program *smart school* ini berjalan sesuai yang diinginkan atau tidak. Karena merekalah yang melaksanakan dan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan program *smart school*. Semakin implementor tersebut memberi respon yang baik semakin efektiflah program *smart school* ini ketika dijalankan. Berdasarkan hal diatas menurut Wayan (2015), Variabel ini mencakup tiga hal penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kondisi yang merupakan pemahaman implementor terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor yang merupakan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berkesimpulan, bahwa :

1. Implementasi program *smart school* di Kota Makassar meliputi:a). **Modernisasi Informasi** dalam hal ini pada *student smart card* dan *smart class* belum terlaksana secara maksimal karena terkendala pada masalah finansial dimana pihak sekolah dituntut untuk mandiri dalam hal tersebut, sehingga masih kurangnya sosialisasi dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang seharusnya ada. Sedangkan pada komunikasi antar guru, siswa dan orangtua siswa lebih mudah sudah terlaksana dengan baik karena manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh seluruh elemen yang terlibat. b). **Tontonan yang mengandung informasi positif di area lingkup sekolah** dalam hal ini pada *e-learning* belum terlaksana secara maksimal karena sarana dan prasarana juga yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan program tersebut sedangkan pada *e-book* sudah berjalan dengan baik karena sangat mempermudah siswa dalam proses belajar mengajar. c). **Wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis** telah berjalan dengan baik karena dengan hal ini, para siswa mampu mengembangkan potensinya di bidang tulis menulis sehingga sangat bermanfaat bagi siswa.
2. Program *smart school* ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi social, politik dan ekonomi dan disposisi implementor. Faktor yang paling berpengaruh adalah sumber daya dalam hal ini sumber daya finansial.

karena untuk memanfaatkan teknologi di lingkungan sekolah membutuhkan dana yang tidak sedikit apalagi pada program *smart School* ini, sekolah-sekolah yang melaksanakan dituntut untuk mandiri dalam mengimplementasikan program *smart school* ini. Sehingga sangat berpengaruh pada penerapan program *smart school* khususnya pada pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya cukup berpengaruh dengan baik pada program implementasi program *smart school* ini.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan sosialisasi dari pemerintah mengenai program *smart school* kepada semua sumber daya manusia yang akan mengimplementasikan program *smart school* ini.
2. Diharapkan dukungan dari pemerintah khususnya financial karena itulah faktor utama yang menjadikan program *smart school* belum terlaksana secara maksimal.
3. Perlu dibangunnya jaringan baru antara sekolah dengan pihak tertentu agar mampu bekerja sama dalam mengimplementasikan program *smart school* ini khususnya dalam pembuatan *student smart card*.
4. Perlunya evaluasi program *smart school* ini kepada walikota Makassar selaku penggagas program ini agar kendala-kendala yang dihadapi oleh implementor dapat segera diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No. 1
- Anindya, Wayan Pramithasari. 2012. Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakasantri Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No. 1
- Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan Pemerintah Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, Vol 2, No.1
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC, Congressional Quarterly Press.
- Fajarisma, Ahmad. 2009. Analisis Implementasi Kurikulum Berbasis Lingkungan Hidup Pada Program Adiwiyata Mandiri di SDN Dinoyo 2 Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol 2. No.2
- Haedar, Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Admnistrasi Publik*, Vol 1, No. 1
- Landriyani, Ellen. 2014. Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol 2, No.1
- Machin, A. 2014. Implementasi Pendekatan Saintifik, Penanaman Karakter, Dan Konservasi Pada Pembelajaran Materi Pertumbuhan. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, Vol 3 No.4
- Maksimilianus, Maris Jupri. 2013. Implementasi Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol 1, No.1
- Munandar, Aris. 2008. Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol 4, No.1
- Nurhadjadmo, Wahyu. 2008. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 4, No. 2
- Nurjanah, 2016. Pengaruh *Parental Mediation* Pada Program Televisi Terhadap Persepsi Realitas Dan Perilaku Agresif Anak. *Jurnal Komunikasi Islam*. Vol 4, No.1

- Purwonto, Erwan Agus, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Prasojo, LD. 2012. Financial Resources Sebagai Faktor Penenti Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, Vol 4, No.2
- Suryati. 2010. Pembangunan Sistem Informasi Pendataan Rakyat Miskin Untuk Program Beras Miskin (Raskin) Pada Desa Mantren Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. *Jurnal Engineering dan Edukasi*. Vol 2, No.4
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Malang: Bumi Aksara.

Internet

- Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn: *The Policy Implementation Process*. Kertya Witaradya, 13 April 2010. (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHwqGA3rrVAhUUR48KHTXUC94QFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fkertyawitaradya.wordpress.com%2F2010%2F04%2F13%2Fimplementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process%2F&usq=AFOjCNGjy JjY7cL SvWfnIYicS2p9PF8w>)
- Dodi. 2016. *Smart School* Bagian Revolusi Pendidikan Walikota Makassar Segera Di *Launching*, Koran Makassar Online, Makassar 21 April 2016. (<http://koranmakassaronline.com/v2/smart-school-bagian-revolusi-pendidikan-walikota-makassar-segera-di-launching/>)
- Fadhel, Muh. 2016. Dukung Program Pemerintah, SMAGA launching Smart School, Rakyatku Foto, Makassar 30 April 2016. (<http://foto.rakyatku.com/read/2480/2016/04/30/dukung-program-pemerintah-smaga-launching-smart-school>)
- Redaktur. 2014. Walikota Pastikan SMADA *Smart School*, MakassarKota.Go.Id, Makassar 18 Oktober 2016 (<http://makassarkota.go.id/berita-450-walikota-pastikan-smada-smart-school.html>).

Repository. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40882/Chapter%20II.pdf;jsessionid=1606D5CDC57E88307BA9545F2ED91B1D?sequence=3>)

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang pemerintah daerah dan atribut inovasi yang dijadikan ukuran pelaksanaan inovasi pemerintahan daerah.*

Undang-Undang No.17 tahun 2007. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025.*

Undang-Undang No.18 tahun 2002. *Tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Immawaty Hasrullah, dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 12 November 1995. Putri keempat dari sembilan bersaudara oleh pasangan Amrullah, S.Pd, M.Pd dan Hasmila, S.Pd (Alm). Mulai memasuki pendidikan pada Sekolah Dasar Inpres Tamalanrea I di Kota Makassar pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 30 Makassar pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2010 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Makassar pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya, melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2018.

L

A

M

P

I

R

A

N